



**DAMPAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TERHADAP KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN
PEKALONGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
WONOPRINGGO)**

TESIS

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan

**oleh
Eky Risqiana
0301517009**

**PROGRAM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan)” karya,

Nama : Eky Risqiana

NIM : 0301517009

Program Studi : Pendidikan IPS (S2)

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019.

Semarang, Desember 2019

Panitia Ujian

Ketua,



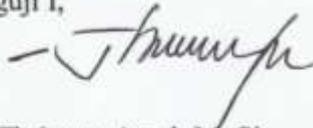
Prof. Dr. Ida Zulachha, M. Hum.
NIP. 197001091994032001

Sekretaris,



Prof. Dr. Dewi Liesnoor Setyowati, M. Si.
NIP. 196208111988032001

Penguji I,



Dr. Thriwaty Arsal, M. Si.
NIP. 196304041990032001

Penguji II,



Dr. Eko Handoyo, M. Si.
NIP. 196406081988031001

Penguji III,



Prof. Dr. Suyahmo, M. Si.
NIP. 195503281983031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Eky Risqiana

NIM : 0301517009

Program Studi : Pendidikan IPS (S2)

menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo)" adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Nopember 2019

Yang membuat pernyataan,



Eky Risqiana

NIM. 0301517009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Kunci hidup bahagia adalah bersyukur ketika diberi kenikmatan, bersabar
ketika diberi ujian.

Doa orangtua adalah pengantar kesuksesan yang mustajab.

Interaksi tertinggi manusia adalah penghargaan.

Persembahan

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Almamaterku Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Risqiana, Eky. 2019. “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan)”. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Suyahmo, M.Si., Pembimbing II Dr. Eko Handoyo, M. Si.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki oleh tiap negara. Hal tersebut dikarenakan kondisi negaranya yang miskin atau masyarakatnya yang memiliki keterbatasan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan diputuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah ada sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk bantuan PKH, peran pendamping PKH serta dampak PKH terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wonopringgo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan menganalisis pelaksanaan PKH di salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan, yakni Kecamatan Wonopringgo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk bantuan PKH yakni bantuan uang tunai PKH dan bantuan komplementaritas seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, bantuan pangan non tunai, beras sejahtera serta bantuan-bantuan lainnya baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (2) peran pendamping PKH yakni mendampingi peserta PKH dalam berbagai komitmen PKH seperti verifikasi pendidikan dan kesehatan, validasi calon peserta PKH, pemutakhiran data serta kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. (3) dampak PKH terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wonopringgo yakni, di satu sisi bisa menyadarkan masyarakat untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada pemerintah, sadar pendidikan dan kesehatan serta peduli terhadap lingkungan. Namun, di sisi lain masih ada masyarakat yang bermental miskin dan merasa perlu dibantu oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya padahal kondisi secara fisik dianggap mampu oleh lingkungan sekitarnya. PKH diimplementasikan secara baik karena memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tetapi, di Kecamatan Wonopringgo pengentasan kemiskinan dengan kategori mandiri atau mampu sulit dilakukan karena tidak adanya koordinasi antara pendamping dan pemerintah setempat karena kurangnya sosialisasi PKH secara umum. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antarsektor pemerintah untuk bisa mewujudkan pengentasan kemiskinan di negara ini.

ABSTRACT

Risqiana, Eky. 2019. "Impact of Hope Family Program (PKH) on Poor Families in Pekalongan Regency (Case Study in Wonopringgo sub-District, Pekalongan District)". *Thesis*. Social Studies Education Master Program. Postgraduate. Semarang State University. Supervisor I Prof. Suyahmo, M.Si., Supervisor II Dr. Eko Handoyo, M. Si.

Keywords: Policy, Poverty Alleviation, The Hope Family Program

Poverty is a problem that every country has. This is because of poor countries or people with limited skills to meet their needs. Several policies on poverty eradication have been adopted and implemented by the Indonesian government, one of which is the Hope Family Program (PKH) which has been implemented since 2007. This study aims to analyze the forms of PKH assistance, PKH companion role and PKH impact on poor families in Wonopringgo sub-district. The research method used is qualitative using a case study approach with the aim of analyzing the implementation of PKH in one of the districts in Pekalongan Regency, namely Wonopringgo sub-district.

The results show that (1) the form of PKH aid is PKH cash aid and complementary assistance such as health insurance, education guarantee, non-cash food assistance, prosperous rice and other assistance funded by the regional and central governments. (2) The role of PKH friends is to assist PKH participants in various PKH commitments such as endorsement of education and health, endorsement of potential PKH participants, updating of data and meeting activities to enhance family skills. (3) the impact of the PKH on the poor families in the Wonopringgo District, on the one hand, can develop the community to live independently without relying on government, education and health awareness and caring for the environment. However, there are still people who are mentally poor and feel the need to be assisted by the government to meet their living needs even though the physical environment is considered to be capable of the surrounding environment. PKH is well implemented as it has a bearing on the eradication of poverty in Indonesia. However, in Wonopringgo Regency poverty alleviation with free or affordable categories is difficult because there is no coordination between the facilitators and the local government due to the lack of socialization of the PKH in general. So good coordination between government sectors is needed to realize poverty reduction in the country.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian dan tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Suyahmo, M.Si. (Pembimbing I) dan Dr. Eko Handoyo, M.Si. (Pembimbing II).

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:

1. Direksi Program Pascasarjana Unnes, Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum. yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini.
2. Ketua Program Studi S2 Pendidikan IPS Program Pascasarjana Unnes Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd. yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang doanya tiada terputus untuk kesuksesan anaknya.
5. Adi Kuntoro, yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penyusunan tesis ini.
6. Teman-temanku, yang selalu memotivasi penyusunan tesis ini.
7. Ibu dan Bapak Pengurus PKH yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Wonopringgo yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi atas terselesaikannya tesis ini.

Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Semarang, Desember 2019

Eky Risqiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Cakupan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Kajian Pustaka	11

2.2 Kerangka Teoretis	47
2.3 Kerangka Berpikir	85
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	86
3.2 Latar Penelitian	87
3.3 Fokus Penelitian	88
3.4 Sumber Data	89
3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	91
3.6 Uji Keabsahan Data	95
3.7 Teknik Analisis Data dan Interpretasi	97
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	100
4.2 Bentuk-bentuk Bantuan Pengentasan Kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wonopringgo.....	106
4.3 Peran Pendamping PKH terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wonopringgo.....	124
4.4 Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kecamatan Wonopringgo.....	144
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	156
5.2 Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka mengenai PKH	21
Tabel 2.2 Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood	61
Tabel 3.1 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data melalui Observasi.....	92
Tabel 3.2 Instrumen dan Pengumpulan Data melalui Wawancara	93
Tabel 3.3 Instrumen dan Pengumpulan Data melalui Dokumen	95
Tabel 4.1 Bentuk-bentuk bantuan sosial PKH	109
Tabel 4.2 Besarnya bantuan tunai PKH	112
Tabel 4.3 Jadwal Penyaluran bantuan tunai PKH	112
Tabel 4.4 Tahapan Verifikasi dan Penyaluran Bantuan.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Implementasi sebagai <i>Delivery Mechanism Policy Output</i> .	54
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir	85
Gambar 3.1 Skema Triangulasi Sumber	96
Gambar 3.2 Skema Triangulasi Teknik	96
Gambar 3.3 Model Tahapan Analisis	99
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Wonopringgo	101
Gambar 4.2 Perkembangan jumlah peserta PKH Kecamatan Wonopringgo	103
Gambar 4.3 Proses Penyaluran BPNT di Ewarong Blumbang Berkembang.....	135
Gambar 4.4 Kegiatan P2K2	135
Gambar 4.5 Verifikasi Pendidikan di SD Negeri Jetaklengkong	137
Gambar 4.6 Contoh KPM Mampu Desa Jetakkidul	140
Gambar 4.7 Pengaduan Non PKH 1	143
Gambar 4.8 Pengaduan Non PKH 2.....	143

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	70
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	122
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Kemiskinan menurut Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen pada Maret 1995 merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu hidup layak. Kemiskinan juga dirincikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. Oleh karenanya kemiskinan menjadi konsep yang dinamis dan konsep yang jelas berupa ketidakmampuan mengatasi kehidupan yaitu mencukupi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial (Kamaluddin, 2004:8).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur

dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan sebagainya). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS, 2019).

Permasalahan kemiskinan memiliki beberapa faktor penyebab yang dilihat dari berbagai perspektif. Penyebab tersebut bergantung pada situasi dan kondisi penduduk di suatu tempat. Terkadang kebutuhan penduduk miskin di suatu tempat berbeda dengan kebutuhan penduduk miskin di tempat lainnya. Sehingga sangat sulit untuk memastikan masalah-masalah dan sebab terjadinya kemiskinan. Bahkan, beberapa program pemerintah belum berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena program pengentasan kemiskinan yang diberikan hanya memberikan ketergantungan

pada masyarakat miskin. Salah satu contohnya adalah BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Bantuan sosial ini diberikan pada masyarakat yang dikategorikan miskin oleh pemerintah, berupa uang tunai. Setelah diberikan kepada yang berhak, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, sehingga pemberian bantuan ini memberikan efek ketergantungan pada masyarakat. Akibatnya pemerintah melakukan evaluasi mengenai bantuan tersebut. Pada tahun 2007, pemerintah mencanangkan program pengentasan kemiskinan yakni Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH merupakan program pemberian bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program ini merupakan hasil evaluasi dari program BLT. Berbeda dengan bantuan langsung tunai yang hanya memberikan uang tunai, PKH adalah program pengentasan kemiskinan dengan memberikan pembelajaran tatap muka setiap bulan. Proses pembelajaran ini diberikan dengan harapan terjadi perubahan perilaku warga miskin dari berbagai hal seperti kesehatan, kebersihan juga cara berpikir (*mindset*). Proses pembelajaran dilakukan oleh pendamping sosial yang merupakan bagian dari sumber daya manusia kementerian sosial. Pendamping sosial PKH ini ditugaskan untuk melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan PKH juga beberapa kegiatan seperti proses pembelajaran yang disebut dengan P2K2 yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang dilakukan setiap bulan.

Beberapa penelitian tentang PKH menunjukkan adanya keterkaitan antara PKH dengan upaya pengentasan kemiskinan. Usman (2013)

melakukan penelitian tersebut untuk menguji tingkat keefektifan program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Gorontalo. Penelitian ini menghasilkan bahwa PKH dapat memberikan dampak yang efektif bagi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kota Utara, Gorontalo. Uji validitas menghasilkan bahwa ada hubungan antara efektivitas PKH dengan penanggulangan kemiskinan sebesar 0,608, sehingga jika digambarkan dengan grafik, maka akan saling bersinergi, semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin tinggi pula penanggulangan kemiskinan dapat teratasi (Usman, 2013:15).

Indrayani, (2013) melakukan penelitian di Madiun, tepatnya di Desa Sugih Waras, Kecamatan Saradan juga dilakukan tingkat efektivitas PKH. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa PKH sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dirinci pada indikator ketepatan sasaran sekitar 80,54%, indikator sosialisasi program sebesar 77%, tujuan program sebesar 84% serta pemantauan sekitar 80%. Kedua penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeda memiliki hasil yang sama bahwa PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini dapat dijadikan landasan penelitian yang sama dengan subjek penelitian tentang PKH.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Anderson (1979) merumuskan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan

tertentu. Definisi kebijakan publik menurutnya mempunyai lima implikasi antara lain 1) setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, 2) kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, 3) kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, 4) kebijakan itu bisa berbentuk positif atau pun negatif, dan 5) kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuk positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif.

Winarno (2008:19) membagi dua wilayah kebijakan publik yakni tindakan-tindakan pemerintah dan mereka yang fokus pada pelaksanaan kebijakan. Pada pandangan pertama, kebijakan publik diidentikkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua lebih pada implementasi kebijakan pemerintah. PKH merupakan implementasi dari pasal 27 dan pasal 34 UUD 1945. Kedua pasal ini berisi mengenai jaminan sosial setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah dengan jumlah warga miskin yang tidak sedikit. Program pengentasan kemiskinan PKH baru dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan tahun 2013. Sumber data kemiskinan ini adalah Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pekalongan adalah 119.975 keluarga. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar

34.779 keluarga yang menerima bantuan sosial PKH yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Salah satu kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan program Keluarga Harapan adalah Wonopringgo. Kecamatan ini terletak di antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jumlah keluarga miskin yang ada di kecamatan ini pun mencapai 21.586 anggota rumah tangga yang terdaftar dalam basis data terpadu (Dinsos Kabupaten Pekalongan, 2018). Jumlah ini sangat tinggi dibandingkan kecamatan lain.

Program Keluarga Harapan dinilai mampu mengentaskan kemiskinan karena kondisi keluarga sebelum dan sesudah menerima bantuan memiliki perbedaan, seperti mental menyekolahkan anak, gaya hidup sehat serta pengaturan keuangan keluarga yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Keluarga miskin sebelum menerima PKH, sebagian besar ada yang sudah menerima Bantuan Langsung Tunai. Bantuan ini sifatnya pemberian uang tunai bagi keluarga miskin tanpa syarat. Akibatnya, penerima BLT akan mempergunakan bantuan tersebut secara bebas tanpa adanya pihak yang memantau. Berbeda dengan PKH yang memberikan beberapa syarat agar bantuannya bisa cair, seperti kehadiran anak-anak di sekolah serta fasilitas kesehatan, juga gizi Ibu Hamil, Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat yang terpenuhi makanannya.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) juga bisa memberikan kesadaran kepada keluarga miskin akan pendidikan, kesehatan dan keuangan keluarga. Contohnya, mitos Ibu hamil tidak boleh memakan

makanan yang tidak direbus, mitos anak balita jika diimunisasi akan sakit dan sebagainya. Pola pikir dan perilaku keluarga miskin tersebut sedikit demi sedikit harus bisa dihilangkan supaya tidak terpaku pada mitos masyarakat zaman dulu. Selain itu, kegiatan P2K2 juga bisa memberikan penyadaran kepada peserta PKH agar bisa mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri atau mampu.

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Wonopringgo ini tersebar di 14 desa dengan jumlah keluarga penerima yang tidak sama di masing-masing desa. Program ini sudah berlangsung selama enam tahun. Selama kurun waktu tersebut, program ini terus berkembang dan dinamis. Artinya, tidak hanya bantuan sosial berupa uang tunai saja, tetapi ada beberapa bantuan sosial lainnya yang dapat diterima oleh keluarga penerima PKH. Dari segi pengawasan, pemerintah melakukan pendampingan melalui pendamping sosial PKH di setiap desa. Peserta PKH dalam satu desa dibagi menjadi beberapa kelompok, melalui kelompok-kelompok inilah kegiatan P2K2 dilaksanakan oleh pendamping PKH dan penerima manfaat PKH.

Beberapa hal inilah yang membuat ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam melalui studi kasus di Kecamatan Wonopringgo yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Banyaknya program pengentasan kemiskinan dari pemerintah yang belum berhasil mengentaskan kemiskinan,
2. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan melalui keluarga miskin di Indonesia,
3. Masih adanya keluarga miskin di Kecamatan Wonopringgo,
4. Adanya pendampingan dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan,
5. Peran pendamping program keluarga harapan di Kecamatan Wonopringgo,
6. Dampak positif adanya program pengentasan kemiskinan melalui PKH di Kecamatan Wonopringgo, dan
7. Dampak negatif program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonopringgo.

1.3 Cakupan Masalah

Penelitian mencakup masalah mengenai bentuk-bentuk bantuan sosial program keluarga harapan, peran pendamping dalam program keluarga harapan dan dampak positif dan negatif program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonopringgo.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk bantuan pengentasan kemiskinan dalam program keluarga harapan di Kecamatan Wonopringgo?
2. Bagaimanakah peran pendamping program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Wonopringgo?
3. Bagaimanakah dampak program keluarga harapan terhadap keluarga miskin di Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Wonopringgo?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk bantuan pengentasan kemiskinan dalam program keluarga harapan di Kecamatan Wonopringgo,
2. Mengetahui dan menganalisis peran pendamping program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Wonopringgo, dan
3. Mengetahui dan menganalisis dampak program keluarga harapan terhadap keluarga miskin di Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Wonopringgo.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Secara Teoretis

Manfaat secara teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memperkaya teori kebijakan publik dari George Edward III khususnya mengenai implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini diterapkan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini juga memberikan sumbangan teori bagi pembelajaran IPS dalam kaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Secara Praktis

Selain manfaat secara teoretis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara praktis, yakni:

- a. bagi pemerintah pusat dan daerah, dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi dalam memberikan program-program pengentasan kemiskinan,
- b. bagi masyarakat, dapat menambah informasi dan wawasan mengenai program-program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah program keluarga harapan, dan
- c. bagi pendamping PKH, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam menjalankan pendampingan terhadap penerima manfaat bantuan PKH.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Kemiskinan didefinisikan oleh sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, antara lain dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua elemen yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Kuncoro, 2003: 123). Beberapa negara berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai kebijakan dan program seperti India, Amerika Latin, Nigeria, Brazil, begitu juga di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan secara nasional saja tetapi juga di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Beberapa penelitian yang mendukung tema penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan cukup banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiansyah (2014) di Desa Pandanrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa program gerdu taskin tersebut efektif dan penting dalam memberdayakan dan meningkatkan

kemandirian usaha masyarakat melalui lembaga unit pengelola keuangan Anggrek. Namun, di sisi lain, UPK Anggrek ini memiliki kelangkaan modal yang digunakan untuk mengembangkan kawasan pedesaan. Selain itu, masih adanya pemangkasan dana, kredit macet, masih adanya dominasi aparat pemerintahan desa, rendahnya dukungan dari pemerintah desa serta kurangnya koordinasi antar-pengelola program di kabupaten atau kota belum maksimal menjadi bahan evaluasi program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang ini. Artinya, program tersebut efektif untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Namun di sisi lain perlu adanya tindak lanjut dari beberapa evaluasi adanya program ini dengan tujuan agar program ini berjalan sesuai harapan.

Sutikno dan kawan-kawan melakukan penelitian pada tahun 2010 mengenai program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan model pemberdayaan dengan pendekatan sistem. Tahapan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan adalah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, kondisi infrastruktur dasar, persoalan sosial-budaya, dan potensi yang dimiliki; mengidentifikasi keinginan, harapan, dan memprediksi peluang pengembangan ekonomi; membuat perencanaan program pengentasan kemiskinan melalui analisis SWOT dan perencanaan program pendampingannya; pembentukan KPD, konfirmasi dan rencana implementasi program bersama KPD. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan *scoring*, program terpilih di antaranya pelatihan dan pendampingan wirausaha, pendirian koperasi

simpan pinjam, pengadaan air bersih untuk RTM, pengembangan desa dengan pendayagunaan air bersih, penanganan sampah rumahtangga, dan program pendidikan paket A, B, dan C.

Program pengentasan kemiskinan erat hubungannya dengan perancangan sistem identifikasi dan pemetaan kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Redjeki, Guntara dan Anggoro melakukan penelitian mengenai hal tersebut guna optimalisasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan sistem AHP yakni *Analytical Hierarchy Process* yang merupakan salah satu metode atau model pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria kompleks menjadi suatu hierarkhi sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan.

Hasilnya adalah metode ini dapat memberikan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam penentuan status warga miskin dan juga penentuan pemberian program yang tepat bagi warga masyarakat. Sistem pendukung keputusan pengelolaan data kemiskinan yang dihubungkan dengan sistem berbasis geografis dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan program pengentasan kemiskinan. Sistem informasi geografis ini dapat dibangun melalui data berbasis dusun yang bisa membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam melihat profil kemiskinan dan program yang ada dalam penanggulangan kemiskinan.

Yulianto melakukan studi kasus mengenai fenomena-fenomena program pengentasan kemiskinan di Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten

pada tahun 2005. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan perencanaan *top-down*, kecuali PPK yang menggunakan pendekatan perencanaan gabungan *top-down* dan *bottom-up*. Tradisi perencanaan memandang perencanaan sebagai analisis kebijakan, sedangkan PPK memandang perencanaan sebagai pembelajaran sosial.

Model pembangunan yang dipakai adalah pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali PPK yang menggunakan model pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena keterbatasan anggaran, penentuan sasaran program dihadapkan pada pilihan antara kualitas program dengan kuantitas. Bidang kesehatan dan pendidikan yang mendapatkan prioritas utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, menjadikan program di bidang ini dapat melaksanakan secara bersama-sama pilihan kualitas dan kuantitas tersebut.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program sesuai pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat, kecuali dalam PPK dimana pemerintah daerah bertindak sebagai pembimbing dan penanggungjawab pelaksanaan program sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Peranan masyarakat cenderung pasif, kecuali dalam PPK masyarakat sebagai pelaku utama program. Implementasi program sesuai dengan petunjuk pelaksanaan setiap program. Berdasarkan hasil analisis tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah peningkatan sosialisasi program baik terhadap program lama dan baru berjalan,

pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan meningkatkan koordinasi diantara pelaku-pelaku program di Kabupaten Klaten.

Karim, Suyahmo dan Lestari melakukan penelitian mengenai kebijakan walikota Salatiga tahun 2010. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa setiap kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan walikota Salatiga yang diawasi DPRD Kota Salatiga. Bentuk pengawasan lebih ke arah preventif atau pencegahan tetapi juga kadang bisa berupa pengawasan represif (mengoreksi). Mekanisme pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi atau koreksi terhadap kebijakan yang diambil walikota Salatiga dengan temuan-temuan langsung yang dianggap menimbulkan masalah bagi masyarakat atau melalui aduan dari masyarakat. Artinya, penelitian tersebut menjadi salah satu contoh bahwa setiap kebijakan yang diambil baik pusat maupun daerah selalu diawasi oleh masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan program keluarga harapan yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan diawasi langsung oleh masyarakat.

Banowati (2013) dalam artikelnya menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengolahan sampah, khususnya di daerah perkotaan. Hal tersebut disebabkan lingkungan perkotaan lebih berpotensi menghasilkan sampah tanpa mengetahui cara pengolahannya, sehingga alternatif pengolahan sampah sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan di perkotaan yakni di Kota Semarang. Pelatihan menggunakan model deduktif dan induktif secara *on the job* karena penduduk miskin perkotaan belum berpengalaman

mengolah sampah menjadi kompos. Analisis usaha membuat kompos didapatkan nilai B/C sebesar 1,098 yang bermakna usaha efisien dan menguntungkan. Pengolahan 1 *container truck* sampah volume bruto 3-5 ton didapatkan produk kompos sebagai material fungsional baru (MFB) sebesar 0,3 ton per daur. Harga jual senilai Rp. 250.000,00 berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Rp. 35.000 per hari mampu mengentaskan penduduk miskin ke posisi tidak miskin. Implikasi model pelatihan merupakan tindakan solutif yang edukatif dan mudah dijalankan karena penduduk diberi bekal keterampilan hidup yang berpeluang mengentaskan kemiskinan di perkotaan.

Banowati dan Paramita (2014) melakukan penelitian tentang pemberdayaan penduduk miskin di Kota Semarang. Pelatihan dan Pemagangan, keduanya merupakan kegiatan edukatif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengentaskan kemiskinan diri *trainee* yakni penduduk miskin. Sebagai tindakan memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), tentang pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis dan ekologis melalui pengelolaan dan pengolahan yang benar. Keterampilan (*skill*) yang dilatihkan bersifat simpel/ sederhana. Edukasi inipun dapat meningkatkan kemampuan (*ability*) atau perilaku sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja dari setiap individu dalam mengolah sampah sebagai *raw material* dari suatu proses *recycle* sesuai jenis sampah.

Pemberdayaan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan

produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan tambahan/sampingan yang selama ini mereka belum bekerja penuh agar diperoleh pendapatan yang lebih layak. Penduduk miskin setengah penganggur mampu mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan curahan waktu untuk membuat kompos berkisar 2 – 3 jam per hari. Peningkatan pendapatan berkisar Rp 35.000 - Rp 48.360 per hari yang semakin tinggi bila dibuat sebagai media tanam.

Di sisi lain, beberapa penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Salah satunya adalah penelitian dari Reza Annur pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membedakan tingkat kemiskinan di kecamatan Jekulo dan Mejobo berbeda adalah kondisi geografis; luas wilayah kecamatan Jekulo lebih besar dan letaknya lebih strategis di jalur Pantura; potensi ekonomi di kecamatan Jekulo lebih baik karena didukung adanya industri sektor usaha besar; kondisi rumah tangga miskin di kecamatan Jekulo lebih rendah; lamanya pendidikan yang ditempuh penduduk kecamatan Jekulo lebih lama; mata pencaharian penduduk kecamatan Jekulo sebagian besar sebagai karyawan swasta dan pedagang.

Marmujiono (2014) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di

Kabupaten. Brebes, pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes, dan rasio ketergantungan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil penelitian strategi pengentasan kemiskinan dengan menggunakan analisis SWOT, maka strategi pengentasan kemiskinan melalui strategi S-O (*Strength–Oppoutunities*) yaitu dengan meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Brebes.

Sementara itu, Astuti pada tahun 2018 juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang signifikan memengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Semarang (dengan pengaruh dari yang paling besar) adalah angka ketergantungan, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan sektor pekerjaan kepala rumah tangga. Variabel-variabel tersebut berpengaruh secara positif. Rumah tangga dengan karakteristik jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4 orang, angka ketergantungan di atas 100 persen, kepala rumah tangga dengan pendidikan paling tinggi SLTP dan bekerja di sektor pertanian, maka probabilitas rumah tangga tersebut miskin adalah lebih besar.

Sebaliknya untuk kondisi rumah tangga yang jumlah anggota rumah tangga lebih kecil dari 4 orang, angka ketergantungan di bawah 100 persen, kepala

rumah tangga dengan pendidikan minimal SLTA dan bekerja di sektor non primer (misal jasa), maka probabilitas rumah tangga tersebut miskin adalah lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Variabel jenis kelamin kepala rumah tangga dan keluhan kesehatan kepala rumah tangga tidak signifikan memengaruhi kemiskinan rumah tangga pada level 5 persen, tetapi signifikan pada level 15persen, oleh karena itu dalam penelitian atau analisis yang lain variabel ini tetap harus dipertimbangkan. Variabel-variabel tersebut berpengaruh secara negatif. Terdapat beberapa faktor yang secara nyata memengaruhi kemiskinan rumah tangga, untuk itu disarankan: Penduduk miskin diperlakukan sebagai aktor utama dalam perang melawan kemiskinan, sedangkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan katalisator serta memberikan dukungan terhadap aktor utama.

Program pengentasan kemiskinan harus benar-benar menyentuh akar permasalahan agar program tersebut hasil nyata dapat dirasakan secara nyata. Oleh karena itu perlu diketahui faktor apa saja yang secara nyata memengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Semarang. Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui pembagian peran, dan didukung oleh kelembagaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian.

Kemiskinan selalu dijadikan topik pembahasan dalam setiap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan juga

mengenai pengentasan kemiskinan berupa program-program atau kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan dinilai efektif apabila melibatkan masyarakat miskin. Artinya, masyarakat miskin diberdayakan agar menjadi masyarakat yang mandiri, kreatif dan inovatif. Pemerintah sebatas kail saja, sehingga masyarakat miskin tidak melulu bergantung pada pemerintah.

Secara nasional, ada salah satu program pengentasan kemiskinan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat sejak tahun 2007 disebut dengan PKH (Program Pengentasan Kemiskinan). Program tersebut telah banyak diteliti oleh berbagai kalangan di tingkat daerah. Beberapa penelitian mengenai Program Keluarga Harapan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Kajian Pustaka mengenai Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1	Karakteristik, Demografi, Sosial, Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan	Megawati Simanjuntak, Herien Puspitawati, MD Djamaludin	2010	Karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi keluarga contoh yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah persentase terbesar keluarga berkisar antara 5 hingga 6 orang dengan struktur keluarga adalah keluarga inti, serta usia ayah dan ibu berkisar antara 30 sampai 49 tahun. Tingkat pendidikan ayah dan ibu hanya sampai SD dengan profesi ayah sebagai buruh, sedangkan ibu kebanyakan tidak bekerja. Sebagian besar kepala keluarga dan istri melek aksara baik dari membaca maupun menulis aksara latin. Penerimaan total keluarga meningkat secara signifikan 1,3 kali lipat pada saat mendapat PKH. Kategori kemiskinan contohnya adalah tidak berubah dengan adanya PKH, namun kepemilikan alat elektronik mengalami peningkatan. Pengeluaran rata-rata per bulan keluarga untuk pangan 70,1% dan nonpangan 29,9%. Terjadi peningkatan yang signifikan menjadi hampir dua kali lipat keluarga yang berhutang saat mendapat dana PKH. Kemampuan membayar hutang dengan aset yang dimiliki, semakin meningkat dengan diperolehnya dana PKH.
2	Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan	Sonni Ansori	2010	Pelaksanaan komitmen yang masih belum berjalan efektif di lapangan, harus menjadi pembelajaran kepada UPPKH kabupaten dan pemerintah pusat guna mencari formulasi yang tepat agar persoalan ketidak aktifan peserta bisa teratasi. Dalam pertemuan bulanan tidak hanya sekedar pendamping mendengarkan keluhan mereka dan mencatat temuan-temuan baru yang mungkin terjadi, namun secara eksplisit, pelaksanaan pertemuan bulanan digunakan untuk selalu memberikan semangat kepada mereka melalui ketua

	Patrang Kabupaten Jember Tahun 2009			kelompok dan khususnya ketua kelompok agar mereka selalu aktif. Form verifikasi yang selama tahun 2007 sampai 2009 tidak berjalan karena beberapa alasan sebaiknya ada suatu pembenahan di lapangan.
3	Analisis <i>Structural Equation Modelling</i> tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	Herien Puspitawati	2010	Rata-rata umur keseluruhan contoh adalah sebesar 38,04 tahun yang termasuk dalam kategori dewasa madya dan masih merupakan usia produktif. Antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) terdapat kesetaraan, baik dalam sektor publik dan pendidikan maupun pembagian tugas dalam rumahtangga dan sosial. 54,0% mempunyai pembagian peran gender yang tidak seimbang, dengan dominasi istri di sektor domestik dan dominasi suami di sektor publik. Sejumlah kurang dari 50 persen contoh mempunyai pembagian peran gender dengan kategori cukup seimbang, dan hanya kurang dari 5 persen contoh yang mempunyai kategori pembagian peran gender dengan kategori yang sangat seimbang.
4	Strategi Komunikasi Dinas Sosial Makassar dalam Menyosialisasikan Program Keluarga Harapan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Tamalate	Asty Respita	2011	Hasil penelitian yang diperoleh : (1) Dinas Sosial Makassar telah melakukan beberapa langkah terutama dalam penyusunan pesan apik melalui media cetak maupun elektronik dari dialog ataupun pertemuan-pertemuan. (2) Dalam sosialisasi tersebut, yang menjadi faktor pendukung adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat dan yang menjadi faktor penghambat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang program keluarga harapan.
5	Program Keluarga Harapan dan Pemanfaatan	Budi Hidayat, Hendratno Tuhiman,	2011	Hasil estimasi metode <i>double-difference</i> menunjukkan dampak program intervensi PKH pada kenaikan sejumlah indikator pelayanan kesehatan preventif seperti kunjungan posyandu,

	Pelayanan Kesehatan Preventif	Rudy Prawiradinata dan Pungky Sumadi		pemantauan tumbuh kembang anak, dan imunisasi. Temuan ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melanjutkan program. Namun karena evaluasi awal ini memiliki sejumlah keterbatasan, hasil studi ini harus ditafsirkan hati-hati dan divalidasi lebih lanjut dengan data survei PKH tahun 2009 menggunakan berbagai metode analisis.
6	Determinan Gizi Kurang dan Stunting Anak Umur 0-36 bulan berdasarkan Data Program Keluarga Harapan (PKH) 2007	Muhammad Aries, Hardiansyah, Hendratno Tuhiman	2012	Jumlah batita gizi kurang dan buruk (BB/U) serta batita pendek dan sangat pendek (TB/U) pada batita yang berasal dari keluarga penerima program setelah dua tahun PKH berjalan masih tinggi yaitu berturut-turut 20.7% dan 47.4%. Faktor protektif kejadian gizi kurang dan buruk (BB/U) pada batita untuk data tahun 2007 adalah jenis kelamin batita perempuan serta adanya bantuan berupa BLT dan Raskin, sedangkan faktor protektif untuk kejadian pendek dan sangat pendek (TB/U) pada batita jenis kelamin batita perempuan, adanya bantuan berupa BLT dan Raskin. Meskipun keberadaan PKH yang telah berjalan 2 tahun dinilai masih belum dapat memperbaiki status gizi batita tetapi hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan program bantuan lain (BLT dan raskin) merupakan faktor protektif untuk kejadian gizi kurang dan buruk maupun pendek. Oleh karena itu keberadaan PKH masih dipandang perlu dan diduga baru akan dapat menunjukkan hasil (dari segi gizi dan kesehatan) setelah berjalan lebih lama.
7	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Brebes Tahun 2011	Erna Fidyatun	2012	Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan di Kabupaten Brebes sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berjalannya program tersebut dengan baik di Kabupaten Brebes. Meskipun di awal program terjadi beberapa masalah dengan sektor kesehatan, namun sampai saat ini program tersebut sudah semakin baik dan mengalami perkembangan yang signifikan.
8	Program Keluarga	Edi Suharto		PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM

	Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa	dan Djuni Thamrin		agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan. Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini. Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi.
9	Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pogram Keluarga Harapan Studi di Empat Daerah di Indonesia	Togiaratua Nainggolan dan Badrun Susantyo	2017	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PKH perlu dilakukan <i>re-design</i> berupa inovasi program dalam rangka pengembangan program secara fundamental. Inovasi ini difokuskan pada 2 hal, yaitu: (1) merespon upaya yang sudah dilakukan tetapi belum optimal; dan (2) melakukan reorientasi program secara mendasar dengan menjadikan PKH sebagai pintu masuk menuju integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus memperkuat keberfungsian keluarga miskin secara utuh. Upaya ini diharapkan akan “memaksa” anggota keluarga berperilaku produktif, bukan kontraproduktif. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar penyelenggara segera mengambil inisiatif untuk menjadikan PKH sebagai pintu masuk menuju integrasi program perlindungan sosial sekaligus integrasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah ini hendaknya diikuti dengan kajian khusus terhadap berbagai produk kebijakan terkait.
10	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Kesehatan di Desa Pulo Kecamatan	Eka Prastia Pradikta, Indah Prabawati	2013	Tenaga pelaksana kesehatan kewalahan dalam menangani komitmen kesehatan keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH ini di Desa Pulo. Pada variabel disposisi, sudah bisa dikatakan baik pada pelaksanaannya, proses pengangkatan pelaksana program sudah baik. Mengenai insentif pendamping dan bidan desa dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pelaksana,

	Jombang Kabupaten Jombang			sehingga memengaruhi komitmen pendamping dan bidan desa dalam melaksanakan kewajibannya pada Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan.
11	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)	Claudio Usman	2013	Faktor Efektivitas Program Keluarga Harapan ternyata berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan, khususnya pada Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Hasil-hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 1. Jadi ada korelasi positif sebesar 0,608 antara Efektivitas program keluarga harapan dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat efektivitas PKH maka akan semakin tinggi pula penanggulangan kemiskinan. 2. Variasi perubahan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo ditentukan oleh variasi perubahan pada faktor efektivitas PKH itu sendiri sebesar $\pm 60,8 \%$, dan sisanya sebesar $\pm 39,2 \%$ turut ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor efektivitas PKH punya arti penting dalam hal pencapaian penanggulangan kemiskinan.
12	Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting)	Priska A. Matualage	2013	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. nampaknya masih memiliki kendala dan masalah yang dimulai dari pendataan yang terbilang belum selektif dan belum tepat sasaran yang sebenarnya diperuntukkan bagi KSM namun belum terjangkau sepenuhnya, tidak konsistennya Peserta PKH terhadap ketentuan atau syarat yang telah di tentukan. Penyaluran Program Keluarga Harapan dinilai tidak konsisten dengan, penyaluran pada tahap awal, dan kurangnya informasi atau pun sosialisasi bagi peserta PKH.
13	Analisis Efektivitas Pelaksanaan	Agunan P Samsir	2013	PKH telah beberapa kali dievaluasi tahun 2009 - 2010 secara paralel oleh Kementerian Sosial, SMERU dan Bappenas. Hasilnya cukup

	Program Keluarga Harapan 2011			mengejutkan dan memberikan rekomendasi yang konkrit dalam penyempurnaan PKH. Tahun 2011, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan survei lapang untuk mengevaluasi pelaksanaan efektivitas PKH di delapan daerah penerima program bantuan sosial. Program ini cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan layak untuk dilanjutkan pada tahun mendatang dengan memperbaiki kegiatan administrasi, target sasaran, perluasan daerah penerima PKH, kualitas pendamping PKH dan mekanisme monitoring dan evaluasi PKH.
14	Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun	Firma Kusuma Indrayani	2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengolahan data, kriteria penilaian masing-masing item pertanyaan dalam angket didominasi oleh penilaian efektif dan sangat efektif. Adapun prosentase terendah dalam penelitian ini adalah 65%, indikator hasil data prosentasi terendah adalah pada aspek pendidikan yakni berkaitan dengan ketetapan sasaran penerimaan bantuan bagi anak Sekolah Dasar (SD). Sementara prosentase tertinggi adalah 88% skor tertinggi diperoleh pada indikator peningkatan akses dan layanan kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga sangat miskin di Desa Sugihwaras. Jadi, penelitian yang berjudul Efektivitas Program keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dinyatakan efektif, dengan Rincian skor yang diperoleh dalam indikator ketepatan sasaran sebesar 80,54, untuk indikator sosialisasi program memperoleh skor sebesar 77 %, selanjutnya tujuan program mendapat skor 84% dan kemudian dalam indikator pemantauan PKH mendapat skor sebesar 80%.
15	Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesian Conditional Cash	Suahazil Nazara dan Sri Kusumastuti Rahayu	2013	PKH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Koordinasi dengan berbagai sektor pengentasan kemiskinan dan lembaga perlindungan sosial diperlukan. Selain itu, pada penelitian ini juga ditemukan

	Transfer Programme			bahwa PKH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang sifatnya berkelanjutan sehingga membutuhkan kerjasama yang baik antar-sektor pemerintahan guna pengentasan kemiskinan.
16	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) DI Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	Antriya Eka Suwinta, Indah Prabawati	2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan walaupun serangkaian tahapan berjalan dengan lancar, sumberdaya yang dimiliki meliputi staf, kewenangan, informasi dan fasilitas maupun kemampuan pelaksana (disposisi) PKH di Desa Maron juga telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan PKH dan para pelaksana di Desa Maron juga telah menjalankan tugas sesuai dengan <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP's) serta melakukan pembagian tata kerjanya dengan baik namun demikian dalam implementasi PKH di Desa Maron masih ditemui kendala antara lain kurang sadarnya peserta PKH terhadap inti sari PKH dan arti pentingnya PKH bagi kehidupan peserta PKH, permasalahan intern antara pelaksana pusat dan daerah serta permasalahan fanatime bidan.
17	Hubungan antara Niat Peserta dengan Implementasi Komitmen Program Keluarga Harapan Komponen Kesehatan	Muji Sulistyowati Ambarwati	2014	Implementasi komitmen PKH komponen kesehatan oleh responden di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebagian besar masuk pada kategori sangat patuh (38,8%). Sebagian besar niat responden masuk pada kategori sedang. Tidak ada hubungan antara niat dengan implementasi komitmen PKH komponen kesehatan. Hal tersebut terjadi karena hubungan antara niat dan perilaku bersifat melemahkan sepanjang waktu. Sebagian besar <i>attitude</i> , <i>perceived norm</i> dan <i>personal agency responden</i> masuk pada kategori sedang. Ada hubungan antara <i>attitude</i> dengan niat untuk mengimplementasikan komitmen PKH komponen kesehatan dengan kuat hubungannya masuk pada kategori lemah.
18	Implementasi	Nurfahira	2014	Hasil penelitian ini adalah:

	Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar	Syamsir		<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi PKH bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate sudah berjalan dengan baik karena selalu dikawal oleh pendamping yang sudah direkrut oleh pemerintah pusat. 2. Pendamping selalu mengadakan pertemuan kelompok secara rutin. Setiap kali pertemuan kelompok, pendamping selalu menanamkan pemahaman mengenai PKH dan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak RTSM yang dapat meningkatkan kualitas SDM. 3. Faktor yang memengaruhi keberhasilan PKH bidang pendidikan yakni implementasi atau isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.
19	Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang	Oktiano Regina Zufri dan Wahyuningsih	2014	Peran pendamping PKH merupakan seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai anggota/peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan hidup secara mandiri. Harapan dari masyarakat agar selalu berinteraksi, melakukan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun jaringan kerja sehingga anggota masyarakat mampu membangun hidup mereka serta keluarganya secara layak. Kesulitan bagi pendamping adalah pengumpulan berkas formulir pemutakhiran dan juga adanya peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan program PKH. Keberfungsian sosial menjadi strategi dan solusi dalam penanganan kemiskinan, intervensi pendamping senantiasa melihat sasaran perubahan dengan situasi yang dihadapi serta pentingnya peranan Pemerintah Daerah juga menjadi ukuran keberhasilan program PKH
20	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya	Apando Ekardo, Firdaus, dan Nilda Elfemi	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan bisa dikatakan efektif sesuai tujuannya yakni pengentasan kemiskinan. Namun, di sisi lain, penerima program ini belum tepat sasaran sehingga secara data, program ini belum terlaksana efektif.

	Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan			
21	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta	Depi Putri	2014	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karakteristik peserta PKH berusia produktif, kualitas pendidikan formal rendah, menganut sistem keluarga besar, dengan kondisi hunian rumah yang kurang layak, kondisi ekonomi kurang yang ditandai dengan penghasilan rendah, 2) 100 % peserta PKH di Kecamatan Umbulharjo adalah RTSM atau KSM, 3) 42,86% kondisi keluarga peserta PKH di Kecamatan Umbulharjo berada di bawah Upah Minimum Kabupaten atau Kota DIY di tahun 2014 sebab dalam keluarga RTSM atau KSM yang menjadi tulang punggung adalah perempuan (57,14 %), 4) Pelaksanaan PKH di Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga RTSM, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan pendidikan.
22	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Yudid BS Tlonaen, Willy Tri Hardianto dan Carmia Diahloka	2014	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lowokwaru ditujukan kepada masyarakat miskin khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bantuan tersebut bersifat khusus, berupa data masyarakat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Adapun upaya yang dilakukan pendamping PKH di Kecamatan Lowokwaru adalah sebagai berikut: melakukan pemutakhiran data peserta PKH secara berkala, melakukan pertemuan bulanan secara rutin dengan kelompok peserta PKH, dan mengadakan pertemuan pengembangan program</p>

				dengan penyedia layanan.
23	Pengaruh dan Efektifitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie	Lidiana, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan PKH yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie telah dilakukan dengan sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas pemberian bantuan PKH dari 2008-2013 mencapai 95.58%. Bantuan PKH mampu menjelaskan atau memengaruhi partisipasi pendidikan anak-anak RTSM mencapai 96.8% dan sisanya 3.2% dipengaruhi lainnya.
24	Perbedaan Motivasi Berprestasi antara Siswa Reguler dengan Siswa Program Keluarga Harapan (PKH) di SD Negeri Kecamatan Boja tahun ajaran 2015/2016.	Devvy Lutviasari	2015	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan motivasi berprestasi antara siswa reguler dengan siswa Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil uji t, menunjukkan bahwa nilai thitung = 9,042 dan ttabel = 1,980, jadi nilai thitung > tabel. Dengan demikian, terdapat perbedaan motivasi berprestasi yang signifikan antara siswa reguler dengan siswa Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu lebih tingginya motivasi berprestasi siswa Program Keluarga Harapan (PKH) dibandingkan dengan siswa reguler. Motivasi berprestasi siswa Program Keluarga Harapan (PKH) di SD Negeri Kecamatan Boja menunjukkan kriteria sangat tinggi yaitu dengan presentase sebesar 82,3%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak kalah dengan siswa reguler dan mampu bersaing dengan siswa reguler. Siswa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kriteria yang sangat tinggi dalam beberapa aspek yaitu mengantisipasi kegagalan, mengungguli prestasi yang pernah dicapai dan kesempurnaan dalam menyelesaikan tugas.
25	Implementasi Program Penarikan	Dewi Rostyaningsih	2015	Dilihat dari fenomena dalam implementasi program PPA-PKH di Kabupaten Magelang maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas

	Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang			kelompok sasaran dapat memenuhi target dalam pelaksanaan program PPA-PKH di shelter, yaitu sebanyak 450 anak dalam kurun waktu 3 tahun atau sebesar 52,14 % dari jumlah pekerja anak yang terdapat di Kabupaten Magelang. Adapun pelaksanaan pasca shelter yaitu mengembalikan anak yang bekerja ke sekolah baik ke sekolah formal maupun informal hanya sekitar 60 % , sedangkan 40 % lainnya tidak berhasil dikirimkan kembali ke sekolah.
26	Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan	Edi Suharto	2015	Telaah terhadap penerapan PKH di Indonesia menunjukkan bahwa program ini memberi kontribusi yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi sekolah para penerima manfaat (<i>beneficiaries</i>) pada pendidikan dasar dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan.
27	Implementasi Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013	Ahmad Nur Bakhtiar dan Zuly Qadir	2015	Hasil penelitian menunjukkan: 1. Aspek kepatuhan dalam implemetasi program PKH di kecamatan Berbah dapat dilihat dari: a). Aturan pelaksanaan PKH di kecamatan Berbah selain aturan dari pusat, juga diwajibkan untuk mengikuti pertemuan kelompok, b). Komitmen pelaksana terhadap aturan pelaksanaan PKH di kecamatan Berbah tahun 2013 sudah sangat baik, c). Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan tahapan kegiatan PKH di kecamatan Berbah tahun 2013 sudah bagus, dan 2. Faktor yang berperan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan (PKH) di kecamatan Berbah tahun 2013: a). Sumberdaya; untuk sumber dana dengan menggunakan dana APBD I, APBD II, dan swadaya masyarakat, dan untuk sumberdaya manusia dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pedukuhan sudah baik, b). Komunikasi sesama pendamping kalau ada kegiatan saling bantu membantu, c). Sikap Pelaksana apabila ada kondisi di lapangan yang tidak sesuai

				dengan aturan pelaksanaan PKH, maka segera dilakukan perbaikan dengan melakukan validasi data, d). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di kecamatan Berbah petani-petani ikan produksinya sudah bagus, sektor perdagangan juga sudah membaik.
28	Implementasi Sistem Pengaduan Masyarakat Non Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsosnakertrans Kabupaten Pati.	Andi Agus Setyawan, Noor Latifah, dan Anteng Widodo	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan (SPMPKH). Proses pengaduan saat ini masih belum berjalan optimal karena pelaporan pengaduan dan pencatatan kriteria masih secara manual dan membutuhkan waktu yang panjang. Tahap perancangan sistem menggunakan metode pengembangan sistem waterfall dan metode perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language. Sedangkan untuk perhitungan menggunakan metode SAW. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Non Peserta Program Keluarga Harapan (Pkh) di Dinsosnakertrans Kabupaten Pati Berbasis Web.
29	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan (Studi Kasus Desa Jatisawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu)	Muhtadin	2016	Hasil temuan lapangan menunjukan kurangnya pengawasan yang belum maksimal dari keluarga baik ibu maupun ayah, serta minimnya motivasi orang tua terhadap anaknya untuk pergi ke sekolah, Dalam pelaksanaan PKH bidang kesehatan belum semua peserta program keluarga harapan mendapatkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena periode <i>updating</i> data kemiskinan dari BPS tahun 2011.
30	Evaluasi Kebijakan	Ida Syamsu	2016	Secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di

	Pengentasan Kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung	Roidah		Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rejotangan mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa yang semula mereka tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) RTSM sudah mulai aktif dan mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka guna menatap masa depan yang lebih baik.
31	Pengaruh Motivasi, Kompensasi, dan Kompetensi terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Sumatera Selatan	Nadia Afriliana	2016	ada pengaruh yang signifikan Motivasi, Kompensasi, Kompetensi terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Sumatera Selatan. Secara parsial, hanya variabel kompensasi yang tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan di Sumatera Selatan.
32	Penerapan Metode Analitical Hierarchy Process dalam Penentuan Warga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus : Kantor Lurah Tegal Sari Mandala II)	Paulus Lubis, Berto Nadeak, Rivalri Kristianto Hondro	2017	Proses perhitungan metode AHP dalam sistem pengambil keputusan ini didasari dari nilai bobot setiap kriteria yang ditentukan. Prosedur penilaian kualitas mengajar guru dilihat dari ketepatan memulai pelajaran, kemampuan atau keterampilan guru mengajar, mengulangi penjelasan materi, adil dan memiliki pengetahuan yang luas. Dengan bobot persentase dari masing – masing kriteria 15%, 20%, 10%, 25%, dan 30%.
33	The Role of Facilitator in the	Agus Salim Fuadi, Sanggar	2017	Penelitian telah menemukan bahwa implementasi PKH di pulau kecil belum optimal meskipun mengklaim kemampuannya untuk

	Implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) in Small Island (Case Study in Hiri Island District, Ternate City–North Maluku)	Kanto dan Sholih Muadi		mengurangi tingkat kemiskinan. Tanggung jawab dan pengawasan yang baik dari fasilitator dan peserta adalah kunci keberhasilan implementasi program.
34	Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan	Fitria Nur Anggraeni	2017	Hasil penelitian diperoleh bahwa seluruh responden menyatakan sudah siap menggunakan uang elektronik karena memberikan manfaat efisiensi dan efektifitas serta menjadi jembatan awal bagi masyarakat unbanked untuk masuk kedalam sektor keuangan sedangkan kendala yang masih dihadapi masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai uang elektronik serta masih ada yang belum memiliki telepon genggam. Untuk itulah diperlukan peningkatan literasi keuangan agar program tersebut dapat dilaksanakan.
35	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru)	Anofrizen	2017	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan Kota Pekanbaru dapat membantu kinerja pihak UPPKH Kota Pekanbaru dalam mengelola pengaduan yang masuk. Sistem yang diusulkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem lama terkait pengelolaan data pengaduan Program Keluarga Harapan Kota Pekanbaru.
36	Implementasi	Arif Citra	2018	Implementasi pemberdayaan dalam pelaksanaan Program Keluarga

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)	Permana, Cahyo Sasmito, dan Cakti Indra Gunawan		Harapan adalah membenahan kualitas hidup para peserta PKH dengan memperbaiki aspek kesehatan dan pendidikan keluarga, berperan aktifnya para peserta PKH dalam mensukseskan program ini, dan terlibatnya para peserta PKH dalam sosialisasi hal – hal yang baik kepada masyarakat sekitarnya. Faktor pendukung yaitu keberadaan pendamping PKH, keaktifan pemerintah daerah serta kemauan masyarakat peserta program ini untuk menjadi lebih baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidaksiapan program dalam hal peraturannya dan kesiapan para stakeholder program ini. Dampak implementasinya dapat terlihat dari membaiknya status kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan peserta Program Keluarga Harapan di Kota Malang.
37	Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang	Wimmi Halim	2018	Elit Politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya, diantaranya Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan SBY.
38	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ranotana Weru	Jael Murib, Oktavianus Porajow, dan Loraine W. Th. Sondak	2018	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin di Desa Ranotana Weru adalah sangat baik segi dari keperluan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan. Penerima Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ranotana Weru terdiri dari delapan keluarga. Bantuan bersifat Bantuan Langsung Tunai kepada peserta mempertahankan kehidupan kebutuhan dasar rumah tangga. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ranotana Weru tidak tepat pada sasaran dari tujuan utama Program Keluarga Harapan. Karena manfaat oleh peserta

				Program Keluarga Harapan di kelurahan ranotana weru paling banyak gunakan adalah kebutuhan pokok rumah tangga dibandingkan pendidikan dan kesehatan.
39	Pencapaian Program Keluarga Harapan (PKH): Kasus di Desa Tedunan, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara	Wulandari dan Pudji Muljono	2018	Pencapaian PKH di Desa Tedunan dilihat dari 3 aspek yaitu tingkat akses pelayanan kesehatan, tingkat akses pelayanan pendidikan, dan tingkat status gizi. Mengacu pada 3 aspek tersebut, hanya satu aspek yang tidak tercapai, yaitu pada tingkat akses pelayanan kesehatan.
40	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan	Yuni Catur Wulan, Nurul Umi Ati, dan Roni Pindahanto Widodo	2019	Pelaksanaan kelompok usaha bersama di kota Probolinggo mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait. Implementasi program ini dimulai dengan adanya suatu analisis tentang bagaimana kondisi kemiskinan yang ada diwilayah tersebut dalam kasus ini adalah wilayah Kota Probolinggo. Dalam perkembangannya KUBE diwilayah ini telah tercipta sebanyak 30 KUBE dengan kegiatan yang beragam. Implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet dikarenakan pendampingan yang kurang membuat program ini seakan sia-sia dan menimbulkan masalah baru. Selain itu, pembentukan KUBE yang dilakukan oleh sebagian pihak yang memiliki kepentingan serta masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini. Kurangnya keterampilan yang diberikan dan Bantuan yang diterima tidak utuh, selain itu bantuan yang diberikan diadakan melalui pihak ketiga.

	Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur)			
41	Sistem Pendukung Keputusan (DSS) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Bangun Rejo Kec.Punduh Pidada Pesawaran dengan Menggunakan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Nur Aminudin dan Ida Ayu Puspita Sari	-	Ranking dan bobot dari bantuan PKH adalah jenis pekerjaan kepala keluarga tidak tetap berada di peringkat pertama dengan ranking 4,9. Dengan hasil output layak atau tidaknya calon penerima dalam PKH, diperoleh dari hasil perbandingan nilai lamda bobot kategori penilaian dengan nilai bobot rasio yang sudah ditentukan.
42	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto	-	Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.
43	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Dyah Ayu Virgoretta, Ratih Nur	-	Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Dalam kondisi sehat anak akan siap

	dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)	Pratiwi dan Suwondo		memasuki pendidikan. Dengan pendidikan terjadi perubahan ke arah perbaikan SDM. Perbaikan SDM untuk jangka panjang akan memutus tali rantai kemiskinan. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 158 pada tahun 2007 dan menurun dari tahun ketahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.
44	Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Selayang	Grace Leliharni Damanik	-	Hasil analisis data menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap Program Keluarga Harapan dengan nilai 0,87 yang dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang Program Keluarga Harapan serta tujuan dan manfaatnya. Sikap masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan adalah positif dengan nilai 0,91 dilihat dari penilaian dan tanggapan masyarakat yang setuju dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan dan menilai program ini bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan adalah positif dengan nilai 0,92 yang dilihat dari keterlibatan dan keaktifan masyarakat dalam setiap kegiatan pertemuan dan pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai peserta dari Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Selayang adalah positif.
45	Case Study Of PKH (CCT Indonesia) In Sumba Barat And	Dinar Dana Kharisma	-	Secara umum solusinya dapat dibagi menjadi tiga bidang yang berbeda: Peningkatan desain penargetan PKH. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pelaksana PKH di keduanya tingkat pusat dan daerah. Peningkatan infrastruktur pendukung dalam

	Kediri			implementasi PKH terutama di tingkat lokal.
46	Makna Pendidikan Anak Bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)	Riyang Prasasti dan Sugeng Harianto	-	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, serta konsumsi. Selain itu penelitian ini menemukan motif sebab dan tujuan penerima PKH Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menyekolahkan anak-anaknya. Yang menjadi motif sebab antara lain: latar belakang pendidikan orangtua, religiusitas orangtua, pendidikan tidak terkait dengan pekerjaan, dan literasi orangtua. Sementara itu motif tujuan antara lain: mendapatkan pekerjaan dan pendapatan, literasi anak, religiusitas anak, dan mendapatkan bantuan PKH.
47	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada Siswa SMP	Rahmat Diyanto, Darsono, Edy Purnomo	-	Hasil evaluasi menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada siswa SMP berhasil dengan baik dimana pelaksanaan Program PKH yang diberikan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan membawa pengaruh terhadap kemajuan belajar siswa dalam membantu mensukseskan wajib belajar minimal 9 tahun.

Sumber: Hasil Dokumentasi (2019)

Berdasarkan kajian pustaka mengenai PKH menunjukkan bahwa program keluarga harapan sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Namun, pelaksanaan tersebut berbeda-beda di setiap kota. Beberapa penelitian mengenai PKH lebih pada implementasi program pengentasan kemiskinan. Program keluarga harapan sejauh penelitian yang dilakukan hanya fokus pada implementasi dan ketepatan sasaran penerima program ini sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Wonopringgo lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan pada keluarga miskin setelah adanya program keluarga harapan. Dampak yang dimaksud bisa berupa dampak positif atau pun negatif. Selain itu, bentuk-bentuk bantuan yang diterima oleh penerima manfaat serta peran pendamping dalam PKH juga akan dianalisis sehingga studi kasus yang dilakukan untuk menganalisis ketiga hal tersebut tidak hanya pada pelaksanaan program dinilai efektif atau tidak efektif atau sekadar tepat sasaran atau tidak program tersebut.

Program pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan di Indonesia saja. Di beberapa negara juga membuat formulasi-formulasi kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Mosley dan Hulme (1998) menganalisis tentang keterkaitan keuangan usaha mikro dengan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang pada tahun 1998. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak pinjaman pada pendapatan rumah tangga penerima cenderung meningkat, pada tingkat yang menurun, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan posisi aset penerima, suatu hubungan yang bisa dengan mudah menjelaskan dalam hal preferensi yang lebih besar dari orang miskin untuk

pinjaman konsumsi, kerentanan mereka lebih besar terhadap penjualan aset yang dipaksakan dan kisaran peluang investasi mereka yang terbatas.

Ada perubahan signifikan terhadap pola umum ini (khususnya, orang sangat miskin yang telah mampu mencapai dampak pinjaman yang signifikan); hubungannya signifikan pada level 1% untuk semua institusi yang diteliti. Hubungan ini mendefinisikan, pemberi pinjaman dapat memfokuskan pinjaman mereka pada yang termiskin dan menerima total dampak yang relatif rendah pada pendapatan rumah tangga, atau sebagai alternatif fokus pada yang tidak terlalu miskin dan mencapai dampak yang lebih tinggi.

Bird dan Rodriguez (1999) melakukan penelitian mengenai desentralisasi dan pengentasan kemiskinan di negara Filipina pada tahun 1999. Di negara-negara berkembang, kebijakan desentralisasi dianggap sebagai kebijakan yang lumrah diambil dan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Contohnya adalah negara Indonesia, Vietnam dan termasuk Filipina. Fokus pada kebijakan desentralisasi dan migrasi merupakan alternatif kebijakan yang dirumuskan dalam pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini dianggap paling ampuh untuk menangani permasalahan kemiskinan di Filipina seperti masalah kesehatan, pendidikan dasar, perumahan dan infrastruktur.

Menocal (2001) melakukan penelitian mengenai program pengentasan kemiskinan yang disebut dengan *progesa*. Program ini merupakan program pengentasan kemiskinan di Meksiko di bawah pemerintahan Zedillo. Penelitian dilakukan untuk menganalisis program *progesa* termasuk politisasi pemerintah

atau bukan sejak tahun 1994 hingga 2000. Pemerintahan Zedillo bersikeras bahwa Progresa adalah program pengentasan kemiskinan yang murni tanpa agenda politik apa pun. Di satu sisi, indikator kemiskinan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan mendapat manfaat dari program. Progresa juga menunjukkan sisi politis, mengungkapkan bahwa, dalam beberapa hal, eksekutif dan PRI terus menggunakan trik lama dalam upaya untuk mengubah hasil pemilihan.

Nelson (2004) melakukan penelitian mengenai mekanisme pengentasan kemiskinan di beberapa negara. Penelitian ini menganalisis efek redistributif dari kebijakan sosial tertentu dalam perspektif komparatif. Hasilnya bahwa di beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Swedia, Inggris dan Amerika lebih efektif menggunakan transfer redistributif gabungan dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga bergantung pada kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya kebijakan ini dibuat untuk kepentingan sosial dan utamanya pengentasan kemiskinan.

PKH juga dilakukan di negara lain yang disebut dengan program transfer tunai bersyarat/*Cash Conditional Transfers* (CCT). Di bawah administrasi Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) dan terutama Presiden Lula (2003), program transfer tunai bersyarat telah diadopsi sebagai kebijakan sosial utama di Brasil. Ini mengikuti tren yang ditandai sejak 1990-an di Amerika Latin menuju pembentukan jaring pengaman yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan.

Lula mengkonsolidasikan dan memperluas CCT, pertama di bawah Fome Zero dan kemudian Bolsa Familia, sekarang skema semacam itu terbesar di dunia.

Keempat sub-programnya (tunjangan pendidikan untuk meningkatkan kehadiran di sekolah, nutrisi ibu, suplemen makanan dan subsidi gas domestik) memberi manfaat bagi sekitar 30 juta orang termiskin di Brasil, dengan target 44 juta pada tahun 2006. Sejak tahun 2003, pengeluaran untuk Bolsa Familia meningkat secara signifikan untuk mengkonsumsi lebih dari sepertiga anggaran bantuan sosial untuk sektor-sektor termiskin dan tetap menjadi kebijakan utama menjelang pemilihan presiden Oktober 2006. Meskipun cakupan Familia mengesankan, namun, evaluasi sistematis dampak sosial dan ekonominya masih kurang.

Bukti dari program CCT lain di Amerika Latin menunjukkan bahwa hasil positif dapat dicapai dalam hal memenuhi beberapa kebutuhan mendesak masyarakat miskin. Namun, ada banyak masalah implementasi. Ini termasuk penargetan penerima manfaat yang buruk, kurangnya koordinasi antar-menteri, pemantauan yang tidak memadai, klientelisme, akuntabilitas yang lemah, dan dugaan bias politik. Mengingat tingginya profil transfer tunai dalam agenda kebijakan sosial Brasil, pertanyaan-pertanyaan kunci perlu ditanyakan. Kekhawatiran ini, pertama, sejauh mana Bolsa Familia memang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan; dan kedua, apakah hal itu menciptakan ketergantungan yang lebih besar kepada kaum miskin pada pemberian

pemerintah dan dukungan politik dengan mengorbankan investasi sosial jangka panjang untuk pembangunan (Hall, 2006: 689).

Yesudian (2007) melakukan kajian program pengentasan kemiskinan di India. Hasilnya adalah bahwa pengentasan kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi program kesejahteraan pekerja, program ketahanan pangan, program ketahanan sosial dan program pengentasan kemiskinan masyarakat urban. Program pengentasan kemiskinan ini dipengaruhi oleh kekuatan pemerintah dalam mengimplementasikan program tersebut. Selain itu, pemerintah tidak memarginalkan penduduk miskin yang ada di negaranya serta tiap program ataupun bantuan harus dievaluasi agar bisa menjadi lebih baik.

Penanggulangan kemiskinan juga dilaksanakan di Ikwano LGA, Negara Abia, Nigeria melalui program pembangunan pedesaan. Penelitian mengenai dampak program pembangunan pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan ini dilakukan oleh Nwachukwu pada tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pembangunan pedesaan yang memiliki tujuan pengurangan kemiskinan berdampak signifikan pada produktivitas dan pendapatan pertanian. Kesadaran sangat tinggi sementara partisipasi lebih banyak di Program Pengembangan Pertanian (ADP), dengan persentase sangat banyak representasi sekitar 79, dibandingkan yang lain.

Perencana program dan pelaksana didesak untuk mengintensifkan penciptaan kesadaran di pedesaan dan mengadopsi penggunaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) di pelaksanaan proyek pembangunan

pedesaan dengan dorongan pengentasan kemiskinan. Pemerintah, di semua tingkatan, disarankan untuk mengadopsi kebijakan dukungan harga yang meningkatkan pendapatan produsen.

Program pengentasan kemiskinan di Nigeria merupakan suatu kebijakan dari pemerintah. Program tersebut harus mampu memberikan stabilitas ekonomi. Beberapa program pemerintah belum bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Nigeria sehingga memerlukan penilaian dan evaluasi lebih lanjut dan menemukan terobosan-terobosan baru dalam menanggulangi kemiskinan (Samuel, 2009). Menurutnya, program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik jika pemerintah tidak melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi. Pemerintah harus fokus pada warga miskin dan fokus pada implementasi pelaksanaan program, sehingga pemerintah saling bersinergi satu sama lain dalam menangani kemiskinan di Nigeria.

Crick Lund (2011) melakukan penelitian tentang kemiskinan dan gangguan mental: memutus siklus di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian ini dilatarbelakangi beberapa fakta mengenai kesehatan mental dan kemiskinan berinteraksi secara negatif di negara-negara berkembang. Penelitian menggunakan dua tinjauan sistematis menilai dampak intervensi pengentasan kemiskinan pada kesehatan mental, gangguan neurologis, dan penyalahgunaan zat dan efek intervensi kesehatan mental pada individu dan keluarga atau status ekonomi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Hasil menunjukkan bahwa dampak kesehatan mental dari intervensi pengentasan

kemiskinan tidak dapat disimpulkan, meskipun beberapa transfer tunai bersyarat dan program promosi aset memiliki manfaat kesehatan mental.

Tijjani (2014) melakukan penelitian mengenai program pengentasan kemiskinan di Nigeria. Nigeria merupakan negara termiskin ke-25 di dunia ini. Hasilnya adalah bahwa kemiskinan yang terjadi di Nigeria disebabkan oleh nutrisi, jumlah penduduk yang meninggal dan lahir dan yang terpenting adalah rendahnya tingkat pendapatan dari warga setempat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir dimiliki oleh suatu negara. Di beberapa negara, kemiskinan sering disebabkan oleh kondisi penduduk dan tingkat pendapatan. Permasalahan kemiskinan sering terjadi di negara-negara berkembang. Beberapa penelitian menghasilkan solusi yang diambil oleh suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar atau infrastruktur. Bahkan di negara Amerika Latin sudah menggunakan transfer tunai bersyarat sejak tahun 1995.

Program ini dianggap bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Bantuan semacam ini di Indonesia disebut dengan Program Keluarga Harapan karena ada syarat-syarat tertentu atau komitmen tertentu yang harus dilakukan oleh penerima bantuan agar bantuannya tetap diberikan. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap bantuan yang diberikan harus memberdayakan masyarakat sebagai penerima bantuan tersebut agar mampu hidup mandiri dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah saja. Hal ini juga dilakukan di

Indonesia bahwa bantuan sosial PKH seharusnya dapat merangsang rakyat untuk bisa membuka usaha secara mandiri sehingga program ini akan dikatakan berhasil ketika masyarakatnya sejahtera.

2.2 Kerangka Teori

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki oleh setiap negara. Di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan jadi masalah yang sangat penting yang perlu dipecahkan. Beberapa kebijakan diterapkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Kebijakan ini disebut kebijakan publik.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serentetan instruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa definisi kebijakan publik diantaranya:

- a. Eyestone, kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya;
- b. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan; definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan publik harus mencakup apa yang benar-benar diharapkan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena keduanya memiliki dampak atau konsekuensi sama besarnya terhadap masyarakat.

- c. Friedrich, kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Pada hakikatnya, kebijakan publik menurut Brian W. Hogwood dan Gunn (Wahab, 2008: 18) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

- a. Kebijakan sebagai tabel atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai produk politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Selain itu, penggunaan istilah kebijakan sering dijumpai dalam konteks mengenai kebijakan ekonomi pemerintah, kebijakan sosial, kebijakan luar negeri, dan sebagainya.
- b. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan sering dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan umum dari kegiatan yang dilakukan.
- c. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus. Kebijakan untuk menunjukkan adanya usulan-usulan tertentu (spesifik), baik yang dilontarkan oleh mereka yang berada di luar struktur pemerintah (kelompok kepentingan atau partai politik) maupun yang disampaikan oleh mereka yang berada di struktur pemerintahan.

- d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah. Kebijakan publik dikatakan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
- e. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal. Pemerintah diberi otoritas formal berupa wewenang dan tanggungjawab untuk merumuskan, melaksanakan dan menilai kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat.
- f. Kebijakan sebagai program, yakni suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan pengesahan atau legislasi, pengorganisasian, dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan.
- g. Kebijakan sebagai keluaran. Kebijakan dilihat dari apa yang senyatanya dihasilkan atau diberikan oleh pemerintah, sebagai kebalikan dari apa yang secara verbal telah dijanjikan atau telah disahkan lewat undang-undang. Keluaran bentuknya bermacam-macam, misalnya berupa uang, pemberian pelayanan kepada publik dan lain-lain.
- h. Kebijakan sebagai hasil akhir atau dampak. Artinya, bahwa kebijakan publik yang telah dilaksanakan membuahkan dampak (pengaruh) baik yang positif maupun negative kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
- i. Kebijakan sebagai teori atau model. Semua kebijakan mengandung asumsi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa konsekuensi dari

tindakan pemerintah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut membentuk teori kausalitas atau model sebab akibat.

- j. Kebijakan sebagai proses. Artinya, setiap kebijakan terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang prosesnya menyangkut waktu yang panjang dan sangat kompleks. Proses kebijakan meliputi kegiatan merumuskan, melaksanakan dan menilai kebijakan yang melibatkan unsur waktu dan tingkat kesulitan yang tinggi.

Berdasarkan definisi mengenai kebijakan publik tersebut, kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai program, yakni suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan pengesahan atau legislasi, pengorganisasian, dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Artinya bahwa program keluarga harapan merupakan salah satu kebijakan public dari pemerintah yang memiliki tujuan khusus dan jelas yakni, mengurangi angka kemiskinan dan memberikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, program ini memiliki landasan hukum yang telah disahkan oleh pemerintah dan adanya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program ini.

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara

dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya (Handoyo, 2012: 7).

Abidin (dalam Handoyo, 2012: 17) mencatat ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (*demand*), dan (4) dampak atau *outcomes*. Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Unsur kedua dari kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

Tuntutan merupakan unsur ketiga dari suatu kebijakan. Partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan bisa muncul karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai. Unsur terakhir dari kebijakan adalah dampak atau *outcomes*. Dampak

merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

Secara konsep, Karl Popper berpendapat (dalam Parsons, 2005) terhadap filsafat kebijakan publik adalah (1) pada level metodologi, ia menentang validitas ide ilmu pengetahuan Baconian sebagai induksi, yakni observasi terhadap fakta-fakta sebagai dasar pendeduksian teori atau hukum umum, (2) sebuah metode kebijakan publik yang bertujuan membuat pengambilan keputusan politik mendekati pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah, menurut Popper (dalam Parsons, 2005), tidak terdiri dari proses pembuktian logis berdasarkan akumulasi fakta dan bukti, melainkan lebih berada pada latar (*setting*) teori yang dapat difalsifikasi. Ia berpendapat bahwa masalah ada pada struktur pengetahuan dan dia menolak gagasan Baconian bahwa eksistensi fakta terpisah dari persepsi, nilai, teori, dan solusi.

Popper menentang ide ilmu pengetahuan Baconian sebagai induksi yakni observasi terhadap fakta-fakta sebagai dasar pendeduksian teori atau hukum umum. Popper juga menyatakan bahwa kebijakan publik bertujuan untuk membuat pengambilan keputusan politik mendekati pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah (Handoyo, 2012: 22). Teori Karl Popper menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik dirumuskan untuk memecahkan permasalahan publik seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara umum.

Teori kebijakan yang dinyatakan oleh Karl Popper berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat mengukur tingkat keberhasilan kebijakan publik yang telah diputuskan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan.

Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target (Handoyo, 2012: 95).

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Gambaran dari output kebijakan hingga *policy outcomes* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Skema Implementasi sebagai *Delivery Mechanism Policy Output*

Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa, sehingga pihak implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2009).

Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada umumnya kebijakan publik memerlukan kebijakan publik penjabar yakni berupa peraturan pelaksanaan. Keppres, Inpres, Inmen, Permen, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas merupakan keputusan yang bersifat langsung. Rangkaian implementasi kebijakan juga dapat dirinci ke dalam program, proyek, dan kegiatan. Selain itu, organisasi bisa hadir dalam implementasi kebijakan.

Implementasi juga bisa dilakukan oleh organisasi dengan visi dan misinya. Misi menentukan ke arah mana suatu organisasi akan dibawa atau menentukan suatu visi dari individu yang memimpin organisasi tersebut. Misi melekat pada suatu organisasi dan tidak akan berubah selama organisasi tersebut masih ada, sedangkan visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Visi dirumuskan oleh pemimpin, dengan alasan bahwa pemimpin dipilih karena memiliki visi terpilih atau terbaik yang akan membawa organisasi mencapai kemajuan. Setiap pemimpin harus memiliki visi ke arah mana organisasi akan dibawa. Visi terkait dengan periode suatu kepemimpinan, bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Penjabaran dari visi adalah strategi. Berbeda dengan visi dan misi, strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi dijabarkan dalam bentuk kebijakan, baik bersifat publik maupun nonpublik. Kebijakan publik merupakan keputusan politik terhadap pilihan atas suatu strategi. Kebijakan publik selanjutnya dijabarkan dalam program-program. Program-program tersebut selanjutnya dirinci secara detil dalam proyek-proyek dan diimplementasikan dalam

bentuk produk-produk baik dalam bentuk pelayanan maupun barang. Produk disebut juga dengan kegiatan, yang tujuannya adalah memberi pelayanan kepada pemangku kepentingan (Handoyo, 2012: 104).

Implementasi kebijakan publik mempunyai beberapa model, diantaranya:

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik yaitu: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementator), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana.

b. Model Mazmanian dan Sabatier disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi

Proses implementasi meliputi tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan

pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau pun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Implementasi Kebijakan dari Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Nugroho 2009), untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik diperlukan syarat-syarat tertentu. Pertama, adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk di dalamnya sumber daya waktu. Ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang multidimensional dan kompleks sifatnya, sehingga dalam implementasinya memerlukan berbagai sumber, baik

sumber daya maupun sumber aktor. Kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan misalnya, memerlukan penanganan dari berbagai departemen dan kementerian.

Keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang handal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi atau tidak. Logika yang ditampilkan adalah apakah jika tindakan x dilakukan akan terjadi y . Kelima, apakah banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks otomatis dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

Keenam, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasinya tidak akan dapat berjalan efektif apalagi jika hubungannya adalah bersifat ketergantungan. Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas merupakan kunci efektivitas implementasi kebijakan.

Kesembilan, adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi merupakan perekat organisasi, sedangkan koordinasi

merupakan prasyarat dari kerjasama tim dan terbentuknya sinergi. Kesepuluh, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan merupakan syarat dari efektivitas implementasi kebijakan, sedangkan dengan otoritas yang berasal dari kekuasaan, kebijakan akan memiliki dampak berupa kepatuhan dari pihak yang dikenai kebijakan.

d. Model Implementasi Kebijakan dari Goggin, Bowman, dan Lester

Goggin, Bowman, dan Lester mengembangkan *communication* model untuk implementasi kebijakan, yang disebut dengan Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan. Goggin, dkk. bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model implementasi kebijakan Elmore, dkk.

Dikenal dengan sebutan “RE, dkk” yang terletak di kuadran bawah ke puncak dan lebih berada pada mekanisme pasar (Nugroho, 2009). Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model Elmore, dkk. didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk

mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau klien, dan sesuai dengan harapan dari pejabat eselon bawah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan dalam model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat atau melalui lembaga-lembaga nirlaba.

f. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Model ini menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan (Nugroho, 2009). Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward (dalam Nugroho, 2009) menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

g. Nakamura dan Smallwood membuat model implementasi kebijakan secara detil, yang mereka bagi menjadi lima kuadran, yaitu *classical technocracy*, *instructed delegation*, *bargaining*, *discretionary experimentation*, dan *bureaucratic entrepreneurship* (Nugroho, 2009). Model Nakamura dan Smallwood selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood

Policy Makers: Environment I- Policy Formation	Policy Environment Implementers: II-Policy Implementation	Potential Breakdowns
	1. Classical Technocracy	
a. Policy makers formulate specific goals b. Policy makers delegate technical authority to implementers to achieve goals	Implementers support policy makers' goal and devise technical means to achieve these goals	Technical failures of means
	2. Instructed Delegation	
a. Policy makers formulate specific goals b. policy makers delegate administrative authority to implementers to devise the means to achieve goals	implementers support policy makers' goals and negotiate administrative means among them- selves to achieve goals	a. technical failure of means b. negotiation failures (complexity, stalemate)
	3. Bargaining	
a. policy makers formulate goals b. policy makers bargain with implementers over both goals and/or means to achieve goals	implementers bargain with policy makers over goals and/or means to achieve goals	a. technical failure b. bargaining failure (stalemate, non-implementation) c. cooptation or cheating
	4. Discretionary Experimentation	
a. policy makers support abstract (underfined) goals b. policy makers delegate broad discretionary authority to implementers to refine goals and means	implementers refine goals and means for policy makers	a. technical failures of means b. ambiguity c. cooptation d. unaccountability
	5. Bureaucratic Entreprenership	
policy makers support goals and means formulated by implementers	implementers formulate policy goals and means to carry out goals and persuade poliy makers to accept their goals	a. technical failure of means b. cooptation c. unaccountability d. policy preemption

h. Model jaringan menunjukkan bagaimana pembuatan keputusan di dalam organisasi modern merupakan proses panjang yang dapat dideskripsikan

dari sudut pandang struktur hierarkis (Parsons, 2005). Pembuatan keputusan dipahami sebagai hasil dari bermacam-macam interaksi komponen-komponen jaringan. Model jaringan memahami proses implementasi kebijakan publik sebagai sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan aktor-aktor yang independen (Nugroho, 2009). Interaksi dalam jaringan akan menentukan bagaimana implementasi kebijakan dilakukan, permasalahan mana yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting dari aktivitas dalam jaringan. Aktor dalam jaringan relatif otonom, artinya memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral atau pun koordinator jaringan. Kesepakatan atau koalisi di antara para aktor menjadi penentu implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan publik dari George Edward III yakni ketika implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik maka keputusan dari pembuat kebijakan dikatakan berhasil. Teori ini mendukung teori Karl Popper bahwa secara konsep kebijakan publik dirumuskan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik. Edward menilai implementasi kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan isu-isu pokok seperti komunikasi, sumber daya, komitmen dan struktur birokrasi.

Isu komunikasi menurut Edward membahas tiga hal penting dalam proses kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Persyaratan utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti, sehingga komunikasi itu penting. Komunikasi yang dilakukan harus akurat dan dimengerti oleh pelaksana. Beberapa hambatan dalam mentransmisikan kebijakan sebagai berikut.

- a. Pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi kebijakan.
- b. Informasi melewati berlapis-lapis hierarkhi birokrasi yang memiliki struktur yang ketat. Kondisi ini sangat memengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.
- c. Penangkapan komunikasi dipengaruhi oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan akan efektif jika perintah-perintah pelaksanaan konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan,

tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Selain itu, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh unsur kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan komunikasi yang disampaikan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.

Isu yang berpengaruh implementasi kebijakan berikutnya adalah sumber daya. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yakni informasi mengenai pelaksanaan suatu kebijakan dan data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Sumber lain yang penting adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan; mengajukan masalah-masalah ke pengadilan; mengeluarkan perintah kepada pejabat lain; menarik dana dari suatu program; menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah; membeli barang-barang dan jasa; atau memungut pajak.

Sumber penting terakhir dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan,

maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil (Winarno, 2014: 191).

Isu ketiga yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah komitmen atau kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan. Edward berpendapat bahwa banyak kebijakan masuk ke dalam zona ketidakacuhan. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika orang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak mereka setujui, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakkan terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan.

Beberapa sifat birokrasi adalah membatasi perspektif pejabat-pejabat pemerintah terhadap kebijakan substantif dan kepentingan organisasi. Dalam suatu kebijakan masing-masing badan berhubungan mempunyai prioritas-prioritas yang berbeda, komitmen-komitmen yang berbeda, dan cara penanggulangan masalah-masalah yang berbeda. Perbedaan-perbedaan seperti akan menimbulkan perbedaan antara personil-personil dengan tanggungjawab program suatu badan (Winarno, 2014: 201-202).

Isu terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 205-206) mengidentifikasi enam karakter birokrasi, yakni birokrasi di manapun berada dipilih sebagai instrument sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks, birokrasi jarang mati naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi dan birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya.

2. Jaminan Sosial

Filosofi jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) berakar pada sistem kapitalisme karena jaminan sosial diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana mengatasi risiko ekonomi yang timbul secara sistemik dalam siklus ekonomi kapitalisme (krisis). Sistem jaminan sosial mengacu pada kaidah internasional dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen terhadap UUD 1945, dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia.

Pasal 28 H ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang jaminan sosial selain pasal 28 H yakni pasal 27 dan 34. Pada pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan pada pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Pasal-pasal inilah yang secara material menjadi alasan konstitusional di bidang Jaminan Sosial, yang menegaskan bahwa jaminan sosial (*social security*) merupakan hak” (*right*) bukan merupakan “hak istimewa” (*privilege*), karena¹⁶: *“Privilege is a particular benefit or advantage enjoyed by a person, company, or class beyond the common advantages of other citizen. An exceptional or extraordinary power or exemptions. A peculiar right, advantage, exception, power, franchise, or immunity held by a person or class, not generally possessed by others”*.

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Jaminan sosial merupakan satu bentuk sistem perlindungan sosial. Rys (2011) menyatakan perlindungan sosial lazimnya dipahami sebagai intervensi terpadu oleh berbagai pihak untuk melindungi individu, keluarga, atau komunitas dari berbagai resiko kehidupan sehari-hari yang mungkin terjadi, atau untuk mengatasi berbagai dampak guncangan ekonomi, atau untuk memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Sistem perlindungan sosial yang bersifat formal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu (i) bantuan sosial (*social assistance*), (ii) tabungan hari tua (*provident fund*), (iii) asuransi sosial (*social assurance*), (iv) tanggung jawab pemberi kerja (*employer's liability*) (Kertonegoro, 1982). Setiap negara biasanya menggunakan satu atau beberapa bentuk perlindungan sosial tersebut.

Batasan jaminan sosial adalah bantuan untuk menjawab permasalahan sakit, kecelakaan, kelahiran, ketidakmampuan, kesehatan, kematian, tidak

adanya pekerjaan yang dilakukan melalui asuransi atau *direct publik spending* (Spicker, 1995; MHLW, 1999). Dalam pelaksanaannya, jaminan sosial tidak hanya memiliki batasan bidang yang dijamin, tetapi juga memiliki program, jenis, metode, pembiayaan, jangka waktu, kepesertaan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan keterpaduan. Berdasarkan programnya, jaminan sosial dapat dibedakan antara lain dalam pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, jaminan pengangguran dan tunjangan keluarga. Selain itu, kita dapat memahami jaminan sosial dengan merunut perkembangan dari masa ke masa di beberapa negara tentang jaminannya.

Sejarah jaminan sosial memperlihatkan bahwa untuk menerapkan sebuah rencana besar dan strategi tidak cukup hanya memiliki sarana dan teknik penerapan yang tepat tapi yang terpenting adalah tekad politik dari pemerintah tersebut. Pemikiran tentang teknik asuransi sosial mulai dikenal di akhir abad ke 17, tetapi hanya Kanselir Bismarck yang berhasil membuat skema yang diadopsi beberapa tahun kemudian. Pelajaran penting lainnya dari sejarah memperlihatkan bahwa pada dasarnya skema jaminan sosial muncul pada saat rasa solidaritas nasional begitu tebal akibat pengalaman yang mengancam keberadaan individu, seperti perang atau krisis ekonomi atau politik yang berat.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan dan memberikan

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, diharapkan setiap penduduk dapat terjamin ketika menderita sakit, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun.

Masyarakat pada dasarnya selalu berharap bahwa pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, merata, dan menjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah peraturan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diharapkan mampu untuk mensinkronkan berbagai sistem bentuk jaminan sosial yang dapat memberikan perlindungan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dibentuk dalam rangka memberikan jaminan kepada seluruh rakyat, dan merupakan perangkat hukum untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip kegotongroyongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang

mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dan amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dan yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- d. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Prinsip Kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta

kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

- f. Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan untuk dikelola sebaikbaiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

3. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Suparlan (1984:12) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan ini

terlihat pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, rasa harga diri mereka sebagai orang miskin.

Supriyatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Emil Salim (dalam Supriyatna, 1997: 82) membagi karakteristik penduduk miskin menjadi lima, diantaranya tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak di antara mereka yang tidak memiliki fasilitas, dan di antara mereka berusia relatif muda dan tidak memiliki ketrampilan atau pendidikan yang memadai.

Kemiskinan menurut Andre Bayo Ala (1981) bersifat multi dimensional, artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek antara lain: aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan ketrampilan; aspek sekunder berupa jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan itu multi dimensional artinya karena kebutuhan manusia bermacam-macam, maka

kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dimensi-dimensi tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan pendidikan yang juga kurang baik. aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Kemiskinan adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.

Secara umum, kemiskinan dibedakan menjadi empat macam, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan sosial budaya. Pertama, kemiskinan absolut yang menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatannya) begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan). Kedua, kemiskinan relatif berkaitan dengan kepincangan dalam pendistribusian pendapatan nasional terhadap golongan-golongan masyarakat. Ketiga, kemiskinan struktural menunjukkan ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh (sebagai akibat dari) struktur masyarakat yang menghalanginya. Keempat, kemiskinan sosial budaya yakni kemiskinan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat (Gillarso, 2004: 326-328).

Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu :

- a. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
- b. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
- c. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada.

Tidak sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya (Hardiman dan Midgley, dalam Kuncoro, 1997:131). Penduduk negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Sharp et.al (dalam Kuncoro, 1997:131) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang

kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132): adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kartasasmita (1996:4), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodiningrat 1999:81), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan

dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: Pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; Kedua, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Chamber (1983:109) mengemukakan lima karakteristik sebagai ketidakberuntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) *poverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness*.

BPS memberikan profil rumah tangga miskin di Indonesia sebagai berikut.

- a. Anggota rumah tangga lebih banyak, rata-rata umur kepala rumah tangga lebih tua dan rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga lebih rendah dibanding rumah tangga tidak miskin,
- b. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih banyak merupakan rumah tangga miskin,
- c. Tingkat buta huruf kepala rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan yang tidak miskin,
- d. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin lebih rendah dibanding dengan yang tidak miskin,
- e. Pada umumnya, rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian,

- f. Pada umumnya, kepala rumah tangga miskin berstatus sebagai pekerja informal, yakni pekerja bebas (baik di pertanian maupun bukan pertanian), pekerja keluarga atau tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar,
- g. 25,45% rumah tangga miskin menempati luas lantai per kapita kurang dari 8 meter persegi, sementara itu menurut kementerian kesehatan syarat rumah sehat jika memiliki luas lantai minimal 8 meter persegi per kapita,
- h. Rumah tangga miskin memiliki jenis lantai tanah,
- i. Rumah tangga miskin memiliki atap berupa ijuk atau rumbia meskipun juga banyak rumah tangga miskin yang memiliki atap berupa genteng atau beton,
- j. Jenis dinding tembok yang dimiliki rumah tangga miskin lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin,
- k. Penggunaan listrik PLN rumah tangga miskin lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin,
- l. Rumah tangga miskin kurang menikmati air bersih,
- m. Rumah tangga miskin ada yang tidak memiliki jamban sendiri sekitar 20,63%,
- n. Status kepemilikan rumah rata-rata milik bersama, kontrak atau sewa (BPS, 2017).

Moeljarto (1995:98) mengemukakan tentang *poverty profile* sebagaimana berikut: masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain: (a) masalah kemiskinan adalah

masalah kerentanan. (b) kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Korten (dalam Hikmat, 2004:15-16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yakni:

- a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan

masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.

- b. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
- c. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

2.3 Kerangka Berpikir

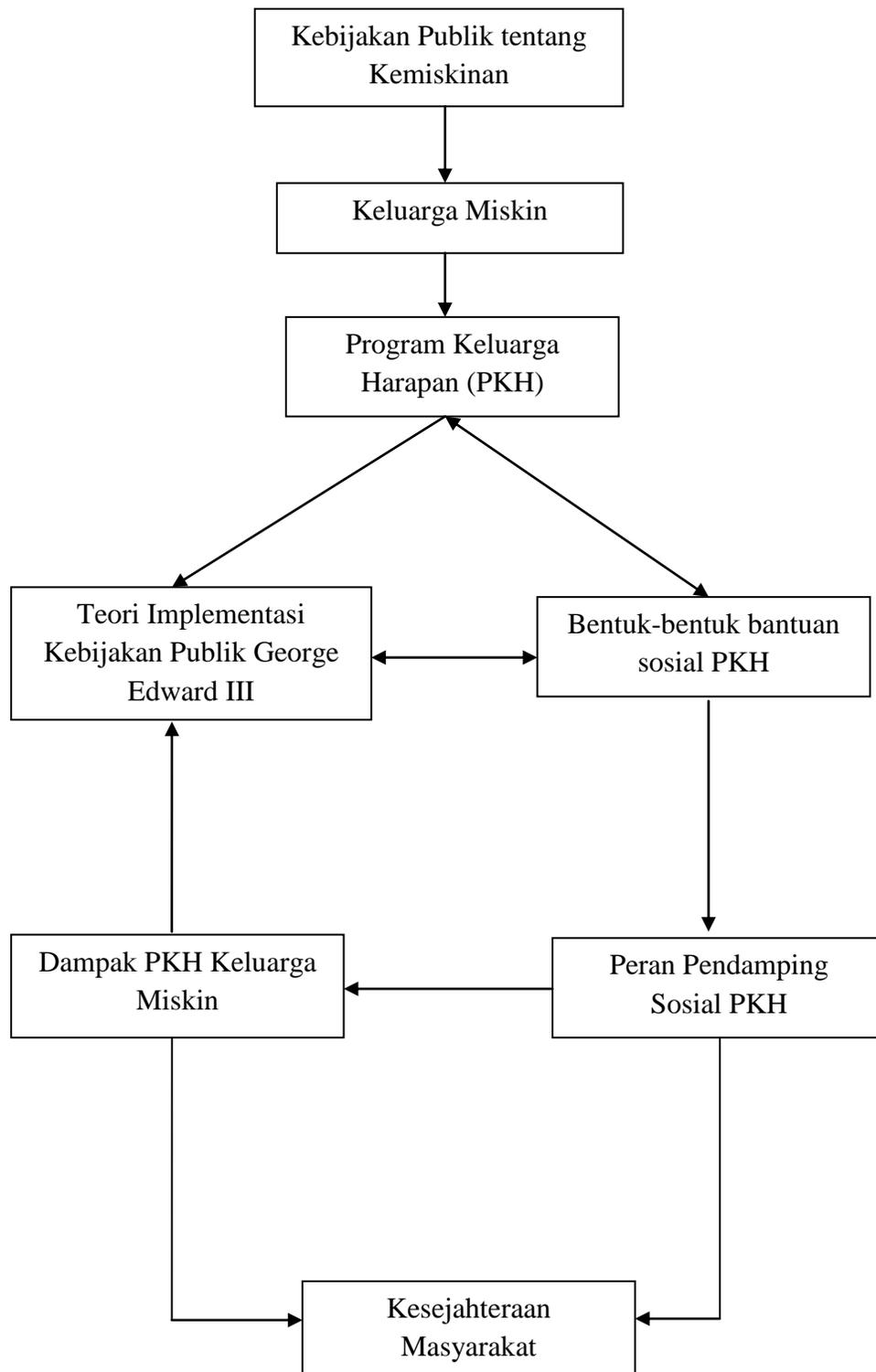
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di setiap negara. Kemiskinan bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya rendahnya

sumber daya manusia, pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan yang diperoleh, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kemiskinan di suatu negara dapat diatasi dengan pengambilan kebijakan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah. Edward III berpendapat bahwa esensi dari pengambilan keputusan sebagai kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Menurutnya, implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kebijakan publik yang telah diputuskan oleh pelaksana kebijakan yakni birokrasi pemerintahan.

Ada empat isu yang memengaruhi implementasi kebijakan publik antara lain: komunikasi, sumber daya, komitmen atau kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Program keluarga harapan merupakan kebijakan publik pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum dan ada birokrasi tertentu dalam melaksanakan program ini. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2007, namun, di Kabupaten Pekalongan baru dilaksanakan pada tahun 2013 termasuk di Kecamatan Wonopringgo. Sasaran dari program ini adalah warga miskin di seluruh Indonesia. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia serta mengubah perilaku masyarakat miskin dari berbagai bidang, baik kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. Selain itu, merangsang mentalitas bangsa Indonesia agar tidak merasa miskin tetapi terus berkarya untuk kemajuan bangsa dan negaranya

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis program keluarga harapan mampu atau tidak memecahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut

sama halnya teori kebijakan publik menurut Karl Popper bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan bertujuan untuk memecahkan permasalahan umum yang menyangkut masyarakat. Penelitian ini tidak langsung menganalisis program keluarga harapan di Indonesia, tetapi, studi kasus di wilayah terkecil yakni tingkat kecamatan. Di wilayah kecamatan memiliki sebaran warga miskin yang berbeda-beda karakteristiknya. Begitu pula di Kecamatan Wonopringgo dimana secara fisik kecamatan ini terbagi atas wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga cukup unik untuk mengkategorikan keluarga miskin. Selain itu, dampak yang muncul dengan keanekaragaman karakter keluarga miskin lebih bervariasi. Beberapa hal tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni bantuan berupa uang tunai dan bantuan komplementaritas. Pemenuhan bantuan komplementaritas memerlukan kerjasama semua pihak, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Peran pendamping PKH dalam pengentasan kemiskinan yakni mendampingi KPM PKH dalam memenuhi kewajiban peserta PKH seperti verifikasi pendidikan dan kesehatan, validasi calon KPM PKH, pemutakhiran data, penyaluran bantuan sosial PKH, dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dampak PKH terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wonopringgo dibedakan dua yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif PKH bagi keluarga miskin di Kecamatan Wonopringgo yakni membantu biaya sekolah dan pemenuhan gizi anak-anak dalam keluarga miskin, membantu keluarga miskin untuk bangkit mendirikan usaha secara mandiri dan memberikan umpan bagi keluarga miskin untuk senantiasa keluar dari jerat kemiskinan.

Sementara itu, dampak negatifnya yakni terjadi konflik sosial yang dikarenakan tidak semua keluarga miskin memperoleh bantuan PKH, masih

ada masyarakat yang menilai bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran serta sulit untuk menyadarkan keluarga yang memperoleh bantuan PKH masih layak dibantu ataupun tidak. Dampak negatif ini bisa diatasi jika masing-masing pihak, seperti pendamping PKH, pemerintah daerah baik tingkat desa, kecamatan atau pun kota/kabupaten mampu berkoordinasi dengan baik agar tujuan pengentasan kemiskinan bisa tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah tingkat desa, yakni agar lebih selektif ketika validasi data calon KPM dengan pendamping PKH. Artinya tidak ada unsur kekeluargaan tapi lebih bersikap netral. Selain itu, ketika keluarga miskin di desanya yang telah mampu enggan dikeluarkan, maka pemerintah desa harus ikut aktif memberikan pengarahan kepada keluarga tersebut yang statusnya sebagai warga di desa itu.
2. Kepada pemerintah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota agar lebih berkoordinasi baik dengan pendamping dalam pengentasan kemiskinan, terutama mengatasi keluarga miskin yang telah mampu namun bermental miskin.
3. Kepada lembaga terkait seperti BPJS, dinas kesehatan maupun penyelenggara bantuan sosial lainnya agar bisa menjadi wadah bagi keluarga miskin yang belum tercakup atau belum memperoleh bantuan komplementaritas, termasuk pemerintah daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Muji Sulistyowati. 2014. *Hubungan antara Niat Peserta dengan Implementasi Komitmen Program Keluarga Harapan Komponen Kesehatan*. Jurnal Promkes Vol. 2 No. 1. Juli 2014 hlm. 1-14 <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/jupromkesb684d4a347full.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Annur, Reza Attabiurrobbi. 2013. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2013*. EDAJ 2 (3) hlm: 409-426) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (diunduh pada 5 Maret 2019)
- Ansori, Sonni. 2010. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (Perbandingan di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2009)*. [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/23959/0%20\(79\).pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/23959/0%20(79).pdf?sequence=1) (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Aries, Muhammad. Hardinsyah dan H Tuhiman. 2012. *Determinan Gizi Kurang dan Stunting Anak Umur 0-36 bulan Berdasarkan Data Program Keluarga Harapan (PKH) 2007*. Jurnal Gizi dan Pangan Vol. 7 (1) Maret 2012 hlm. 19-26 <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/ketahanan.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Astuti, Erli Widhi. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus di Kabupaten Semarang)*. EDAJ 7 (2) hlm: 162:185 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (diunduh pada 5 Maret 2019)
- Banowati, Eva. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Penduduk Perkotaan melalui Pelatihan Pengolahan Sampah*. UNNES JOURNALS Vol: 6 No.: 1 hlm: 159-169 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas> (diunduh pada 5 Maret 2019)
- Banowati, Eva dan Aulia Pradnya Paramita. 2015. *Implementasi dan Sosialisasi Model Pelatihan dalam Pemberdayaan Penduduk Miskin Perkotaan*. Jurnal Geografi Vol 12 No. 1 hlm: 61-73 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/viewFile/8014/5557> (diunduh pada 5 Maret 2019)

- Bird, Richard and Edgard R Rodriguez. 1999. *Decentralization and Poverty Alleviation. International Experience and The Case of The Philipines*. Public Admin. Dev. 19 hlm: 299-319 http://www.academia.edu/download/40382046/Decentralization_and_Poverty_Alleviation20151125-17072-1pddvx6.pdf (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development, Putting the Last First*. London: Longman
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ekardo, Apando, Firdaus dan N Elfemi 2014. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2014) hlm. 1-9 <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/viewFile/1345/556> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Fauzan, Almanshur dan Ghony Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Hall, Anthony. 2006. *From Fome Zero to Bolsa Familia: Social Policies and Poverty Alleviation under Lula* Journal of Latin American Studies 38 (4) pp: 689-709 <http://eprints.lse.ac.uk/21244/>
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Harniati. 2010. *Tipologi Kemiskinan dan Kerentanan berbasis Agroekosistem dan Implikasinya pada Kebijakan Pengurangan Kemiskinan*. (<http://www.repository.ipb.ac.id/>)
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
<https://www.bps.go.id/>
- Indrayani, Firma Kusuma. 2013. *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugih waras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun*. Publika Vol. 1 No. 3 Tahun 2014 <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/8901/8898> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Kamaluddin, Rustian. 2004. *Kemiskinan Perkotaan di Indonesia: Perkembangan, Karakteristik dan Upaya Penanggulangan*.

https://www.bappenas.go.id/files/3513/5022/6052/04rustian__20091014131155__2259__0.pdf (diunduh pada 7 April 2019)

- Karim, Aulia Sobri, Suyahmo dan Puji Letari. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap Kebijakan Walikota Salatiga tahun 2010*. <http://lib.unnes.ac.id/5427/> (diunduh pada 7 Maret 2019)
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidessindo
- Kertonegoro, Sentanoe. 1982. *Jaminan Sosial, Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Mutiara
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPAMD YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*. UPP APM YKPN: Yogyakarta
- Lund, Crick. M D Silva. S Plageron. S Cooper. D Chisolm. J Das. M Knapp. V Patel. 2011. *Poverty and Mental Disorders: Breaking The Cycle in Low-Income and Middle-Income Countries* Lancet 2011 Vol. 378: 1502-1514 www.thelancet.com
- Lutviasari, Devvy. 2015. *Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Siswa Reguler dengan Siswa Program Keluarga Harapan (PKH) di SD Negeri Kecamatan Boja Tahun Ajaran 2015/2016*. Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Vol. 5 No. 2 (2016) <http://lib.unnes.ac.id/23019/1/1301410089.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Marmujiono, Slamet Priyo. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes tahun 2009-2011*. ED AJ 3 (1) hlm: 159-172) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (diunduh pada 5 Maret 2019)
- Matualage, Priska A. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/4503/4032> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Menocal, Alina Rocha. 2001. *Do Olds Habits Die Hard? A Statistical Exploration of The Politicisation of Progres, Mexico's Latest Federal Poverty-Alleviation Programme, Under The Zedillo Administration* Journal of

- Latin American Studies Vol. 33 No. 3 pp: 513-538
<http://www.jstor.org/stable/3653719> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan). 1999. *Annual Report on Health and Welfare*. Tokyo: MHLW
- Milles, Matthew B. dan Huberman H. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mosley, Paul dan David Hulme. 1998. *Microenterprise Finance: Is There a Conflict between Growth and Poverty Alleviation*. Elsevier Science Vol. 26 No. 5 pp: 783-790 (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Murdiansyah, Isnaini. 2014. *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*. Jurnal WIGA Vol. 4 No. 1 Maret 2014 hlm. 71-92
<http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/download/119/111> (diunduh pada 6 Pebruari 2019).
- Nwachukwu, I N dan C I Izech. *Impact of Selected Rural Development Programmes on Poverty Alleviation in Ikwuano LGA, Abia State, Nigeria* AJFAND Vol. 7 No. 5 2007 <http://researchgate.net/publication/46445094> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pradikta, Eka Prastia dan Indah Prabawati. 2012. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*. Publika Vol. 1 No. 3 Tahun 2013
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/8901/8898> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono dan M Makmur. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*. Wacana Vol. 16 No. 2 tahun 2013 hlm. 79- 96

- <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/viewFile/246/245>
(diunduh pada 6 Pebruari 2019).
- Putri, Depi. 2014. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo, Kota Yogyakarta*. Tesis. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. http://digilib.uin-suka.ac.id/15085/1/1220010031_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
(diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Rachman, Maman. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Nilai*. Semarang: UNNES Press
- Redjeki, Sri. M Guntara. P Anggoro. 2014. *Perancangan Sistem Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kemiskinan untuk Optimalisasi Program Kemiskinan*. Jurnal Sistem Informasi Vol. 6 No. 2. Oktober 2014 hlm. 731-743 <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Respita, Asty. 2011. *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Makassar dalam Menyosialisasikan Program Keluarga Harapan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Tamalate*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/155/article%20asti%20respita.pdf?sequence=1> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan Alimadan Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer, George & Smart, Berry. 2014. *Handbook Teori Sosial*. Terjemahan Imam Muttaqien, Derta Sri W., dan Waluyati: Bandung: Nusa Media
- Rys, Vladimir. 2011. *Merumus Ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: PT Pustaka Alfabet
- Simanjuntak, Megawati. H Puspitawati dan MD Djamaludin 2010. *Karakteristik Demografi, Sosial, dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jur. Ilmu Kelu. Dan Kons. Vol. 3 No. 2 Agustus 2010 pp: 101-113
<http://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/viewFile/6138/4764>
(diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Spicker, Paul. 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Supriyatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan sKemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama
- Sutikno. E S Soedjono. A T Rumiati. L Trisunarno. 2010. *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 1 Juni 2010 hlm. 135-147 [http](http://www.jurnalekonomipengembangan.com) (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Suwinta, Antriya Eka dan Indah Prabawati. 2013. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kajian Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 tahun 2016 0-216*
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/13711/12566> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Syamsir, Nurfahira. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/155/article%20asti%20respita.pdf?sequence=1> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Tijjani, Maaruf. 2014. *Poverty Alleviation in Nigeria: a Review of Programmes and a Way Forward*. KUTEJ: a Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 5. 2 July 2014 pp: 150-169
http://www.academia.edu/download/32175767/epw-_gc.pdf (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Ugoh, Samuel C dan Wilfred I Ukpere. 2009. *Appraising the trend of policy on poverty alleviation programmes in Nigeria with Emphasis in a National Poverty Eradication Programme (NAPEP)*. African Journal of Business Management Vol: 3 (12) hlm: 847-854
<https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/0AC32B819108> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ke IV

Usman, Claudio. 2013. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo)*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 001 tahun 2014
<https://pdfs.semanticscholar.org/1533/2f6fdf07fc9cdee35c7e2ddb0510a104a7ce.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)

Utomo, Dedy. A Hakim, dan H Ribawanto. 2013. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 hlm. 29-34
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/333/190> (diunduh pada 6 Pebruari 2019).

Wahab, Sholichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo

-----2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo

Yesudian, CAK. 2007. *Poverty Alleviation Programmes in India: a Social Audit*. Indian J Med Res 126 October 2007 pp: 364-373
<http://www.academia.edu/download/30949549/j.1467-7660.1991.tb00405.x.pdf> (diunduh pada 6 Pebruari 2019)

Yulianto, Trimo. 2005. *Fenomena Program-program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Desa Jotangan, Kecamatan Bayat)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang
http://eprints.undip.ac.id/18044/1/TRIMO_YULIANTO.pdf (diunduh pada 6 Pebruari 2019)

Zufri, Oktiano Regian. 2014. *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)*.
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62214/Oktiano%20Regian%20Zufri%20-%202007910301133_1.pdf?sequence=1 (diunduh pada 6 Pebruari 2019)

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : KPM PKH

Judul Penelitian : **Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan)**

Identitas diri

Nama : Tri Murni

Alamat : Sepete, Jetakkidul

Pendidikan : SMA

1. Sejak kapan Anda memperoleh bantuan PKH?

Jawab: sejak tahun 2013

2. Bagaimana Anda bisa memperoleh bantuan PKH?

Jawab: Waktu itu saya hanya diberi amplop dari Pak Pos. Isinya ya pemberitahuan bahwa dapat bantuan PKH. Baru setelah itu ada pendamping PKH yang datang menjelaskan ke saya maksud dari isi amplop tersebut. Dulu belum pakai ATM Mbak, jadi lewat kantor pos kalau pencairan begitu.

3. Apakah bantuan PKH berupa uang?

Jawab: iya berupa uang untuk anak sekolah Mbak.

4. Selain PKH, bantuan apa lagi yang Anda peroleh?

Jawab: Ada KIS yang kartu berobat gratis itu, ada KIP Alhamdulillah punya anak saya ada bantuannya, tadinya dapat beras rata artinya dibagi rata sama orang-orang desa. Sekarang Alhamdulillah ditambah berasnya jadi 10 kg dan tidak dibagi rata lagi Mbak. Kartu KPS yang kuning itu Mbak, tapi itu tidak ada bantuannya, bantuan WC dari pemerintah desa.

5. Adakah dasar hukum yang mengatur program ini?

Jawab: saya kurang tahu Mbak. Tapi mungkin ada.

6. Apa bedanya bantuan PKH berupa uang dengan bantuan yang lainnya?

Jawab: bedanya kalau PKH harus punya komponen anak sekolah dan berupa uang tunai. Sedangkan KIS berupa pelayanan kesehatan, KIP juga uang tunai Mbak, tapi langsung digunakan untuk pembayaran sekolah.

7. Berapa jumlah uang yang Anda terima?

Jawab: saya berarti Rp 500.000,00 karena Cuma punya 1 komponen anak SMA Mbak.

8. Berapa kali dalam setahun Anda memperoleh bantuan PKH?

Jawab: setahun 4 kali Mbak. Tiap 3 bulan sekali pokoknya.

9. Kapan Anda memperoleh bantuan komplementaritas PKH?

Jawab: kalau yang KIS itu tahun 2013. Tapi kalau KIP, saya lupa Mbak.

10. Apa yang Anda dapatkan dari bantuan komplementaritas PKH tersebut?

Jawab: Ya itu tadi, pengobatan gratis di puskesmas, kalau KIP ya uang tambahan untuk anak sekolah. Kartu-kartu yang lain, belum tau fungsinya apa Mbak, saya simpan saja dulu.

11. Apakah setiap penerimaan bantuan besarnya sama?

Jawab: beda Mbak. Tergantung komponennya apa. Kalau SD itu Rp 225.000,00. SMP Rp 375.000,00. SMA Rp 500.000,00. Setahu saya ada buat Ibu hamil, balita dan lansia itu Rp 600.000,00. Tinggal komponennya apa saja, lalu ditambahkan dapatnya berapa Mbak. Dulu sempat sama rata Mbak. Tahun 2018. Jadi komponennya apa pun, dapatnya sama dalam satu keluarga, Rp 500.000,00.

12. Bagaimana penyaluran bantuan PKH dilakukan?

Jawab: Biasanya pendamping memberi jadwal dan nungguin di ATM Mbak. Tapi seringkali sudah pada diambil sendiri tanpa didampingi karena tidak sabar kalau harus menunggu jadwal dari pendamping.

13. Bagaimana pula penyaluran bantuan selain PKH dilaksanakan?

Jawab: berarti beras ya Mbak, itu sebulan sekali ngambilnya di ewarong Mbak

14. Apakah ada persyaratan tertentu agar bantuan bisa diambil?

Jawab: syaratnya cuma bawa ATM PKH sama nomor pin ATM Mbak. Setelah itu digesek pakai mesin apa itulah Mbak. Baru bantuan beras bisa diambil.

15. Ketika memperoleh bantuan PKH, seharusnya bantuan tersebut digunakan untuk apa?

Jawab: bayar SPP, beli sepatu atau seragam kalau sudah rusak.

16. Sudahkah bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya?

Jawab: kalau saya sudah Mbak. Tiap pencairan langsung saya masukkan ke sekolah buat bayar SPP.

17. Apabila tidak sesuai, maka apakah ada sanksi yang diterima oleh KPM?

Jawab: kalau nyeleweng ya ditegur sama pendampingnya.

18. Apakah bantuan tersebut cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah?

Jawab: dicukup-cukupkan Mbak. Namanya bantuan ya tidak banyak Mbak.

19. Bagaimana agar keluarga miskin memperoleh bantuan PKH?

Jawab: lah itu saya juga diberi amplop Pak Pos. Kalau kata pendamping, tidak bisa mengusulkan, data dari pusat, begitu Mbak.

20. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar memperoleh bantuan PKH?

Jawab: yaitu tadi punya komponen.

21. Apabila sudah menjadi KPM PKH, apakah ada komitmen yang harus dipenuhi oleh KPM tersebut?

Jawab: ada Mbak. Anaknya harus hadir di sekolah kecuali sakit.

22. Bagaimana jika KPM PKH tidak memenuhi komitmennya?

Jawab: tidak keluar bantuannya Mbak.

23. Bagaimana dengan KPM PKH yang memenuhi komitmennya?

Jawab: bantuannya lancar Mbak.

24. Apa yang Anda ketahui tentang pendamping PKH?

Jawab: petugas PKH Mbak. Yang suka mengadakan pertemuan kelompok, memberi materi atau informasi tentang PKH.

25. Sejauh mana Anda mengenal pendamping Anda?

Jawab: sebatas pendamping dan peserta PKH saja Mbak.

26. Apa yang dilakukan pendamping Anda selama ini?

Jawab: mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan, ngecek data, mendampingi pencairan.

27. Apakah Anda mengetahui tugas pendamping PKH?

Jawab: tadi Mbak, mendampingi pencairan, mengadakan pertemuan kelompok, membenarkan data yang salah.

28. Sudahkah pendamping Anda bertugas dengan baik? Coba dijelaskan!

Jawab: menurut saya si sudah Mbak

29. Apa saja peran pendamping PKH dalam proses bisnis PKH?

Jawab: selain tadi ya banyak Mbak. Kalau ada yang keblokir, ATM hilang, dibantu menguruskan, kalau ada bantuan yang tidak sesuai juga diuruskan, yang berkaitan dengan KPM mesti pendamping berusaha membantu Mbak.

30. Bagaimana proses pendampingan PKH dalam mengecek komitmen peserta PKH di bidang pendidikan dan kesehatan?

Jawab: setahu saya ngecek absen di sekolah Mbak.

31. Apa saja bentuk pendampingan peserta PKH oleh pendamping?

Jawab: pertemuan kelompok, pencairan bantuan sama kalau ambil beras Mbak.

32. Bagaimana proses pendampingan tersebut?

Jawab: kalau pertemuan kelompok ya memberi materi. Tapi kalau pencairan, mendampingi kalau ada masalah bisa diatasi atau memperoleh jawaban dari pendamping.

33. Adakah kendala yang dialami pendamping dalam proses pendampingan? Jelaskan!

Jawab: paling kalau ada peserta PKH yang tidak hadir di pertemuan, pendamping menegur Mbak.

34. Bagaimana menghadapi peserta PKH yang tidak berkenan untuk didampingi?

Jawab: tidak ada yang tidak berkenan Mbak.

35. Apakah ada rewards dan punishment dalam proses pendampingan?

Jawab: paling ditegur kalau jarang ikut pertemuan Mbak. Kalau hadiah si tidak ada.

36. Jika ada, bagaimana peserta PKH memperoleh rewards atau punishment?

Jawab: teguran saja Mbak lewat pertemuan, nanti disampaikan ke yang bersangkutan.

37. Apa yang dimaksud P2K2?

Jawab: pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Mbak.

38. Kapan pelaksanaan P2K2 tersebut?

Jawab: sebulan sekali Mbak.

39. Siapa saja peserta P2K2?

Jawab: Ibu-ibu yang dapat PKH.

40. Bagaimana tingkat kehadiran peserta PKH dalam kegiatan P2K2?

Jawab: tadinya ada yang sering izin tidak hadir, tapi sekarang hadir semua. Soalnya takut bantuannya tidak cair Mbak.

41. Bagaimana dengan peserta PKH yang tidak pernah hadir dalam kegiatan P2K2?

Jawab: aturannya bantuan tidak dicairkan Mbak. Kalau dulu tidak ada pengaruhnya sama cair atau tidaknya bantuan. Sekarang, berpengaruh Mbak.

42. Bagaimana jika ada peserta PKH yang tidak dapat hadir dalam kegiatan P2K2?

Jawab: ditegur sama pendampingnya.

43. Apa yang pendamping lakukan dalam kegiatan P2K2?

Jawab: memberi materi terus memberi informasi tentang PKH.

44. Materi apa saja yang disampaikan oleh pendamping dalam kegiatan P2K2?

Jawab: kadang gizi Ibu hamil, balita, lansia.

45. Berapa alokasi waktu dalam melaksanakan P2K2?

Jawab: satu sampai dua jam Mbak.

46. Apakah materi pertemuan disampaikan sesuai jadwal atau tidak?

Jawab: sesuai Mbak

47. Bagaimana proses P2K2 tersebut berlangsung?

Jawab: seru Mbak. Kadang ada permainannya biar tidak mengantuk.

48. Apakah P2K2 tersebut selalu dilakukan setiap bulan atau tidak?

Jawab: setiap bulan Mbak.

49. Apakah pengaruh PKH terhadap keluarga Anda?

Jawab: jadi lebih tahu saja Mbak. Kalau Ibu hamil tidak ada pantangan makanan, contohnya begitu.

50. Apakah menurut Anda, keluarga Anda masih layak memperoleh PKH?

Jawab: masih Mbak.

51. Berikan alasan jika keluarga Anda masih layak memperoleh PKH?

Jawab: Kan masih punya anak sekolah.

52. Apakah definisi miskin menurut Anda?

Jawab: belum cukup Mbak

53. Bagaimana cara KPM PKH agar bisa sejahtera setelah memperoleh bantuan PKH?

Jawab: diberi bantuan dari pemerintah Mbak.

54. Apakah bedanya sebelum Anda memperoleh bantuan PKH dengan setelah memperoleh bantuan PKH?

Jawab: jadi ada yang membantu biaya sekolah. Anak-anak juga bisa melanjutkan sampai SMA.

55. Apakah ada dampak positif atau negatif yang Anda rasakan setelah memperoleh PKH? Jelaskan!

Jawab: negatif si tidak ada Mbak.

56. Apa pekerjaan Anda sekarang?

Jawab: saya ibu rumah tangga. Kalau suami saya, loper celana jeans Mbak.

57. Berapa penghasilan Anda setiap bulan?

Jawab: yah paling berapa Mbak. Tidak mesti, kadang ramai kadang sepi. Rata-rata 1juta lah Mbak.

58. Apa fasilitas rumah yang Anda miliki?

Jawab: tidak ada Mbak.